

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA
MODAL, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI



Oleh:

ADDINI FITRI FADILAH

NIM : 210502110107

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA
MODAL, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonoi (SE)



Oleh:

ADDINI FITRI FADILAH

NIM : 210502110107

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA
MODAL, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI
INDONESIA DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

Oleh

Addini Fitri Fadilah

NIM : 210502110107

Telah Disetujui Pada Tanggal 16 April 2025

Dosen Pembimbing,



Sri Andriani, M.Si

NIP. 197503132009122001

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN DANA PERIMBANGAN TERADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI SKRIPSI

Oleh

ADDINI FITRI FADILAH

NIM : 210502110107

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 30 April 2025

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Isnan Murdiansyah, M.S.A

NIP. 198607212019031008

2 Anggota Penguji

Wuryaningsih, M.Sc

NIP. 199307282020122008

3 Sekretaris Penguji

Sri Andriani, M.Si

NIP. 197503132009122001

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Addini Fitri Fadilah

NIM : 210502110107

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi“

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari pihak lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau Pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 16 April 2025

Hormat saya,



Addini Fitri Fadilah

NIM: 210502110107

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur dan ketulusan hati, kupersembahkan karya ini kepada mereka yang menjadi cahaya, pelindung, teman seperjalanan, sekaligus alasan terkuat dalam setiap langkah dan jatuh bangunku.

Teruntuk orang tua saya tercinta, Ayah Mastuk Adianto dan Ibu Susiani. Tak akan pernah cukup kata, waktu, dan ruang untuk membalas cinta, pengorbanan, dan doa tanpa henti yang kalian curahkan dalam sunyi maupun nyata. Ayah, Ibu segala peluh kalian, segala diam yang penuh harap, dan segala pengorbanan yang tak pernah kalian keluhkan, menjadi cahaya yang membimbing dini melewati badai dan sunyi dalam perjalanan panjang ini. Tak terhitung berapa banyak waktu, tenaga, dan keikhlasan yang kalian berikan hanya demi satu hal yakni melihat dini berdiri kokoh di titik ini.

Ibu, dengan kelembutan hatimu, sabar yang tak terbatas, dan doa-doa yang selalu menyertai setiap pagi dan malamku, engkau adalah wujud nyata kasih tanpa syarat. Ayah, dengan diam yang bijak dan bimbingan yang tidak memaksa, engkau mengajarkanku arti dari tanggung jawab, keteguhan hati, keikhlasan, dan ketulusan tanpa pamrih. Kalian adalah alasan terbesar mengapa dini terus melangkah, bahkan saat rasanya ingin menyerah.

Masih teringat jelas dalam ingatanmu, betapa dulu gadis kecilmu ini begitu rapuh dan tidak tahu apa-apa. Tapi dengan kasih yang tak pernah berpaling dan keyakinan yang tak pernah pudar, kalian tuntun dini pelan-pelan, jatuh-bangun, hingga hari ini aku berdiri di hadapan kalian, bukan lagi sebagai anak kecil yang takut salah, melainkan sebagai seorang sarjana. Bukan karena aku paling pandai, tapi karena cinta kalian yang begitu dalam menjadikanku cukup untuk terus berjuang.

Perjalanan ini bukan sekadar milikku, tapi milik kita. Kalianlah yang diam-diam menyeka peluhku, menopang semangatku saat nyaris runtuh, dan membisikkan harapan saat dunia terasa gelap. Terima kasih telah menjadi rumah dalam segala bentuknya tempat aku merasa cukup, aman, dan dikuatkan. Terima kasih telah hadir, bahkan di saat aku tak tahu harus meminta. Terima kasih telah percaya, bahkan ketika dini sendiri sempat kehilangan arah. Semoga Allah SWT.

senantiasa menjaga dan memberkahi kalian dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan yang tak putus. Inilah persembahan kecil dari anakmu, sebuah awal dari cita-cita yang ingin kutinggikan untuk kalian. Tak ada yang lebih aku harapkan di dunia ini selain membuat kalian terus bangga meski aku tahu, kalian sudah lebih dulu bangga hanya karena aku tetap berusaha.

Untuk adikku tersayang, Muhammad Fadli Firmansyah Terima kasih telah menjadi cahaya kecil yang menyemangati dalam diam. Kehadiranmu adalah motivasi dan semangat yang tak pernah padam. Dalam segala keterbatasan dan keheningan, engkau menjadi inspirasi yang tak ternilai. Semoga kita tetap bisa tumbuh bersama, saling menguatkan, saling menjaga dan menjadi kebanggaan bagi Ayah dan Ibu.

Untuk sahabat-sahabat Dispatch Natasya, Nadila, Anis, Raa'inaa, Renata, Dian dan yang lainnya. Natasya yang selalu jadi "korban keusilan" dini, apalagi waktu dini iseng buka-buka jendela kos cuma buat lihat ekspresimu yang kesal, terima kasih telah menanggapi semua itu dengan tawa dan Nadila yang dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan dini yang kadang berulang, dan tak pernah lelah memberi saran terbaik di tengah bingungnya hari, terima kasih sudah hadir sebagai suara tenang yang seringkali dini butuhkan. Sahabat Dispatch, terima kasih telah menjadi ruang pulang sekaligus tempat berteduh saat hari-hari terasa terlalu sunyi. Kalian bukan hanya teman diskusi atau bercanda, kalian adalah ruang aman yang membuatku merasa didengar, dan dipahami. Kalian juga tidak hanya hadir di momen bahagia, tapi juga pada detik-detik paling rapuh yang seringkali tak bisa dini ungkapkan dalam kata. Dalam tangis yang diam-diam mengalir, dalam tawa yang terlihat ringan, kalian ada dan itu tidak pernah dini anggap remeh. Perjalanan ini akan terasa sepi tanpa langkah kalian di samping dini. Doaku, semoga kalian senantiasa dilindungi dalam setiap langkah, diberkahi dalam setiap usaha, dan dikuatkan dalam setiap ujian. Meski jarak mulai memisahkan ruang dan raga, biarlah komunikasi dan doa menjadi jembatan yang tak pernah putus. Terima kasih telah menjadi bagian dari kisah ini. Kalian adalah bukti bahwa persahabatan sejati tak pernah lekang oleh waktu.

Untuk Teman terbaikku Puput Ayyil Yuniar, mungkin yang sering aku panggil “Bund”. Kita pernah berdiri dalam barisan yang sama satu organisasi, satu atap kos, sempro bersama, hingga detik-detik akhir sidang yang tak terlupa. Kamu bukan sekadar rekan seperjuangan, tapi penenang di tengah riuh, pendengar setia kala lelah, dan teman yang tanpa ragu berbagi tawa maupun diam. Terima kasih, Bund, sudah menjadi rumah kedua selama hari-hari di Malang. Menemani dini berkeliling kota saat malam tiba, berbagi cerita tanpa batas, dan tetap ada meski tahu sisi-sisi terburukku, tapi kamu tidak pergi, justru makin erat menggenggam. Dan untuk itu, aku benar-benar bersyukur. Kamu adalah bukti bahwa sahabat sejati tak selalu hadir dalam bentuk kata-kata besar atau janji manis, tapi dalam diam yang setia, dan dalam kehadiran yang senantiasa ada. Bersamamu, aku belajar bahwa persahabatan bukan hanya soal tertawa bersama, tapi bertahan bersama dalam sunyi dan luka yang tak selalu terlihat. Semoga persahabatan ini tetap tumbuh meski arah langkah kita mungkin berbeda. Doaku, semoga hatimu selalu kuat, langkahmu selalu ringan, dan hidupmu dipenuhi hal-hal baik yang pantas kamu terima, bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu layak.

Untuk Koperasi Mahasiswa Padang Bulan, khususnya keluarga Veliero. Veliero bukan hanya nama. Ia adalah rumah. Tempat di mana saya belajar bukan cuma tentang organisasi, tapi tentang arti kebersamaan, kerja keras, kepercayaan, arti loyalitas, solidaritas dan tempat aku menemukan keluarga kedua yang tak pernah lelah menuntun dan mendukung. Terima kasih telah memberi ruang untuk tumbuh, jatuh, lalu bangkit lagi tanpa dihakimi. Terima kasih telah mempercayai saya menjadi bagian dari kapal kecil yang kokoh itu. Semoga ikatan ini tidak berhenti pada satu periode, tetapi menjadi kenangan yang terus hidup dalam ingatan dan hati. Untuk teman-teman Veliero, terima kasih karena telah menjadi bagian dari hari-hari yang tak tergantikan. Kalian adalah orang-orang yang membuat malam rapat terasa ringan dengan canda, yang membuat setiap beban terasa mungkin untuk dibagi. Bersama kalian, saya belajar bahwa kesederhanaan bisa jadi kekuatan, dan bahwa perjalanan tak selalu mudah, tapi akan selalu berarti ketika dilalui bersama. Semoga langkah kita, ke mana pun arahnya, tetap membawa nilai-nilai yang pernah

kita bangun bersama, saling percaya, saling jujur, dan saling menguatkan, bahkan ketika tak lagi berada dalam ruang yang sama.

Teruntuk diriku sendiri, Addini Fitri Fadilah. Terima kasih telah bertahan ketika segalanya terasa berat. Untuk semua hari yang dipenuhi keraguan, untuk momen-momen saat dirimu dipandang sebelah mata, diremehkan, bahkan dipertanyakan kemampuannya aku tahu itu tidak mudah. Tapi kau memilih untuk tidak menyerah. Kau memilih berjalan, meski langkahmu kadang goyah. Kau memilih membuktikan, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu memang layak. Terima kasih karena tetap percaya, bahkan saat orang lain meragukan. Karena di balik senyum yang kau tampilkan, ada cerita panjang yang tak semua orang tahu. Ada perjuangan yang diam, dan ada luka yang kamu ubah menjadi kekuatan. Untuk semua pencapaian yang mungkin terlihat biasa bagi orang lain, tapi pernah kau doakan dalam diam. Untuk keberanian berdiri saat nyaris tumbang. Untuk keteguhan menjaga mimpi yang sering kali harus kau lindungi sendirian. Semoga aku tak pernah lupa, bahwa aku layak untuk tumbuh dan bahagia. Dan bahwa perjalanan ini masih panjang, tapi kau sudah jauh melampaui versi dirimu yang dulu hampir berhenti di tengah jalan.

Akhir kata, Terima Kasih kepada siapa pun yang pernah hadir, walau hanya sejenak, walau diam-diam. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari mozaik perjalanan ini. Semoga karya kecil ini menjadi persembahan dari hati yang kelak tumbuh menjadi sesuatu yang bermanfaat bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk kalian yang telah menjadi bagian dari kisah ini. Karya ini bukan semata tentang pencapaian akademik, melainkan tentang cinta, harapan, dan doa yang melebur dalam langkah-langkah kecil menuju harapan besar. Semoga ia terus tumbuh, menjadi doa yang diam-diam menguatkan, dan menjadi bekal yang berarti untuk melangkah lebih jauh lagi.

HALAMAN MOTTO

“Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.”

-QS. Al-Baqarah ayat 152

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

-Boy Candra

“Langkah kecilku hari ini mungkin tak dianggap, tapi esok akan berbicara.”

“*كُلُّ شَيْءٍ بِحَسَبِ عَمَلِهِ* ”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis diberi kekuatan lahir dan batin untuk menapaki proses panjang hingga terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi.”

Skripsi ini merupakan rangkaian perjalanan panjang yang tidak mungkin dilalui tanpa bantuan, doa, dan dukungan dari banyak pihak. Maka dengan tulus, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahan dan fasilitasi selama masa studi.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.Ei, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas kepemimpinan dan dukungannya dalam proses akademik.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, S.E., M.Bus., Ak., CA., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahannya yang memudahkan penulis dalam menapaki perjalanan ilmiah.
4. Ibu Sri Andriani, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian membimbing penulis hingga akhir.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi, atas dedikasi dalam mengajar dan inspirasi yang tertanam dalam setiap pelajaran.
6. Ayah Mastuk Adianto dan Ibu Susiani, serta adik tercinta Muhammad Fadli Firmansyah, yang menjadi alasan kuat penulis untuk terus melangkah dengan doa dan cinta yang tak henti.
7. Teman-teman Dispatch khususnya Natasya, Nadila, Anis, Raaina, Renata, Dian, dan lainnya atas cerita, pelukan mental, dan semangat yang membuat hari-hari berat terasa lebih ringan.

8. Keluarga besar Koperasi Mahasiswa Padang Bulan, terutama Veliero Arin, Auria, Farah, Dara, Caca, Puspa, dan lainnya, serta Mbak Nur Lek Wan, dan seluruh karyawan Kopma dan Adik Usaha Elsa, Falakh, Lutfi atas ruang belajar, kerja keras, dan tawa yang membentuk penulis menjadi lebih tangguh.
9. Teman-teman SMA “Hot Isu” Fiyanti, Aulia, Ayu, Sheril, dan lainnya terima kasih atas canda dan doa, semangat dari masa lalu yang tetap menyala hingga hari ini.
10. Teman-teman kamar Ma’had KD 29 khususnya Diana dan teman-teman lainnya yang telah menjadi bagian dari hari-hari penuh refleksi, canda, dan pertumbuhan.
11. Rekan-rekan KKM “66 67 Family” Naura, Beta, Najwa, dan teman-teman lainnya terima kasih atas kebersamaan yang memperkaya pengalaman lapangan.
12. Teman-teman magang di PLN “Anak BUMN” Raa’inaa, Tara, Nabila terima kasih atas semangat kolektif, kebersamaan produktif, dan pengalaman berharga dalam praktik dunia nyata.
13. Teman-teman “Bimbingan Squad Well” Yusti, Luthfia, Nabila, Aqsha, Aisyah, Farida yang saling menopang dalam masa-masa penuh tekanan.
14. Warga Kos Bu Yanti, khususnya Bu Yanti selaku pemilik kos, Mbak Wanda dan seluruh teman kos yang telah menciptakan suasana nyaman selama menyelesaikan studi.
15. Teruntuk teman 24/7 saya selama di Malang Puput Ayyil Yuniar, Sahabat yang kehadirannya senantiasa membawa semangat, memancarkan ketulusan, dan menebarkan kebaikan yang hangatnya selalu menetap, bahkan tanpa diminta.
16. Seluruh teman seangkatan Akuntansi, atas perjuangan bersama, saling dukung, dan semangat kolektif yang menguatkan.
17. Diri sendiri yang telah berani jatuh, memilih bangkit, dan tetap percaya bahwa langkah kecil pun bisa membawa jauh jika terus dijalani

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan masukan yang membangun akan diterima dengan tulus sebagai bekal perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi sederhana yang bermakna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 2 Juni 2025



Addini Fitri Fadilah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
الخلاصة	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Teoritis	13
1.4.2 Manfaat Praktis	13
1.5 Batasan Penelitian	14
BAB II	15
KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Kajian Teoritis	26
2.2.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	26
2.2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	27
2.2.3 Pendapatan Asli Daerah	28
2.2.4 Belanja Modal	28

2.2.5 Dana Perimbangan	29
2.2.6 Partisipasi Masyarakat	29
2.3 Kinerja Keuangan dalam Perspektif Islam	30
2.4 Kerangka Konseptual	32
2.5 Hipotesis Penelitian	33
2.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	33
2.5.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	34
2.5.3 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	35
2.5.4 Partisipasi Masyarakat dalam Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah	36
2.5.5 Partisipasi Masyarakat dalam Memoderasi Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah	37
2.5.6 Partisipasi Masyarakat dalam Memoderasi Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah	38
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Penelitian	40
3.3 Populasi dan Sampel	40
3.3.1. Populasi Penelitian	40
3.3.2. Sampel Penelitian.....	41
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	41
3.5 Data dan Jenis Data.....	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data	43
3.7 Definisi Operasional Variabel	43
3.7.1 Variabel Dependen.....	43
3.7.2 Variabel Independen	43
3.7.3 Variabel Moderasi.....	43
3.8 Analisis Data	46
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif	46
3.8.2 Analisis Pemilihan Model	46

3.8.3 Analisis Regresi Data Panel	48
3.8.4 Uji Asumsi Klasik	48
3.8.5 Pengujian Hipotesis.....	50
3.8.6 Uji Moderated Regression Analysis (MRA).....	51
BAB IV	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Hasil Penelitian	52
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	52
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif	53
4.1.3 Analisis Pemilihan Model	55
4.1.4 Analisis Regresi Data Panel	56
4.1.5 Uji Asumsi Klasik	57
4.1.6 Uji Hipotesis	58
4.1.7 Uji Moderated Regression Analysis (MRA).....	60
4.2 Pembahasan	61
4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan....	61
4.2.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan.....	62
4.2.3 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan.....	62
4.2.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Memoderasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan.....	63
4.2.5 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Memoderasi Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan	64
4.2.6 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Memoderasi Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan.....	65
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR LAMPIRAN.....	78
BIODATA PENULIS	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	33
Gambar 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	54
Gambar 4.2 Uji Chow.....	55
Gambar 4.3 Uji Hausman.....	56
Gambar 4.4 Hasil Regresi Data Panel.....	57
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas.....	57
Gambar 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	58
Gambar 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	58
Gambar 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	59
Gambar 4.9 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Distribusi Sampel.....	42
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	44
Tabel 4.1 Data Objek Penelitian.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Output Eviews

Lampiran 2. Biodata Penulis

Lampiran 3. Bukti Konsultasi

Lampiran 4. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

ABSTRAK

Addini Fitri Fadilah, 2025, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi”

Pembimbing : Sri Andriani, M.Si

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan, Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi Masyarakat sebagai variabel moderasi, penelitian ini menyelidiki pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel yang mencakup 31 provinsi Indonesia selama tahun 2019-2023. Data yang dipakai berasal dari Laporan Realisasi APBD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan Belanja Modal memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah secara positif, tetapi Dana Perimbangan tidak memiliki dampak yang signifikan. Partisipasi masyarakat dapat mengontrol hubungan antara variabel independen dan kinerja finansial. Pemerintah daerah harus meningkatkan PAD, mengoptimalkan alokasi belanja modal, dan memanfaatkan Dana Perimbangan secara transparan, menurut penelitian ini. Pengelolaan keuangan yang lebih baik memerlukan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran.

ABSTRACT

Addini Fitri Fadilah, 2025, THESIS. Title: “The Effect of Own Source Revenue, Capital Expenditure, and Balancing Funds on Local Government Financial Performance in Indonesia with Community Participation as a Moderating Variable”

Supervisor : Sri Andriani, M.Si

Keywords : Local Own Revenue, Capital Expenditure, Balance Fund, Financial Performance, Public Participation.

Community Participation as a moderating variable, this study investigates the effect of Regional Original Revenue (PAD), Capital Expenditure, and Balancing Funds on Local Government Financial Performance in Indonesia. This study uses a quantitative approach with panel data analysis covering 31 Indonesian provinces during 2019-2023. The data used comes from the APBD Realization Report.

The results show that PAD and Capital Expenditure positively affect local government financial performance, but Balancing Funds have no significant impact. Community participation can control the relationship between the independent variables and financial performance. Local governments should increase PAD, optimize capital expenditure allocations, and make transparent use of Balancing Funds, according to this study. Better financial management requires greater public participation in budget planning, monitoring and evaluation.

الخلاصة

أديني فترى فضيله، 2025، معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية في إندونيسيا. العنوان: "تأثير الإيرادات من المصادر الخاصة والنفقات الرأسمالية وموازنة الأموال على الأداء المالي للحكومات المحلية في إندونيسيا مع مشاركة المجتمع المحلي كمتغير معتدل
المشرف سري أندرياني، م.س
الكلمات المفتاحية: الإيرادات المحلية، والنفقات الرأسمالية، وصندوق الموازنة، والأداء المالي، والمشاركة المجتمعية.

تتحرى هذه الدراسة تأثير المشاركة المجتمعية كمتغير معتدل، وتبحث هذه الدراسة في تأثير الإيرادات المحلية الأصلية والنفقات الرأسمالية وموازنة الأموال على الأداء المالي للحكومة المحلية في إندونيسيا. تستخدم هذه الدراسة نهجاً كمياً مع تحليل بيانات اللوحة التي تغطي 31 مقاطعة إندونيسية خلال الفترة 2019-2023. البيانات المستخدمة مأخوذة من تقرير تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ تُظهر النتائج أن برنامج التنمية الزراعية والإنفاق الرأسمالي يؤثران بشكل إيجابي على الأداء المالي للحكومات المحلية، ولكن ليس لصناديق الموازنة أي تأثير كبير. يمكن للمشاركة المجتمعية أن تتحكم في العلاقة بين المتغيرات المستقلة والأداء المالي. وفقاً لهذه الدراسة، ينبغي للحكومات المحلية زيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي وتحسين مخصصات النفقات الرأسمالية واستخدام صندوق الموازنة بشفافية. تتطلب الإدارة المالية الأفضل مشاركة عامة أكبر في تخطيط الموازنة ومراقبتها وتقييمها.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan ekonomi dimulai dari meletakkan fondasi yang kuat di atas kebijakan ekonomi yang baik. Kebijakan ekonomi yang baik pada gilirannya akan memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi inefisiensi dalam system dan dengan demikian memperbaiki keadaan masyarakat secara keseluruhan (Andjarwati et al., 2021). Pemerintah memiliki peran penting dalam kemajauan daerah mengacu pada aturan UU Nomor 32 Tahun 2004 berikutnya terjadi perubahan menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Amandemen itu dimaksudkan guna mendukung terwujudnya hasil guna serta daya guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih efektif dan memiliki manfaat yang optimal dalam mensejahterakan masyarakat serta memperkuat koordinasi dalam berbagai elemen dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, yang mana sebuah wujud pengukurannya adalah kinerja keuangan daerah (Arsallya et al., 2021). Pelaksanaan pengaturan anggaran daerah didukung oleh sebuah jaringan yang terpadu dan terstruktur dengan baik serta dibangun berdasarkan pedoman yang disediakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Andjarwati et al., 2021). Sebagian besar sistem pengelolaan keuangan di tingkat daerah dijalankan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi dalam output (Korompot & Warongan, 2017).

Kinerja dapat dipahami sebagai deskripsi mengenai hasil yang didapat pada pelaksanaan suatu program maupun aktivitas, serta strategi dan kebijakan yang diterapkan guna mewujudkan tujuan, sasaran, visi, dan misi dalam sebuah organisasi. Kapabilitas fiskal adalah suatu Evaluasi performa yang mengacu pada indikator ekonomi. Keberhasilan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah dapat diartikan sebagai acuan

atau indikator yang digunakan oleh suatu daerah untuk menilai kemampuannya dalam mengelola keuangan secara efektif dan tepat. (Simamora & Budiwitjaksono, 2022). Penilaian terhadap kinerja keuangan dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi pencapaian masa lampau melalui berbagai metode analisis. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran posisi keuangan yang mencerminkan kondisi nyata suatu entitas, serta mengidentifikasi potensi kinerja yang dapat berlanjut ke depannya (Nugroho, 2012).

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menggunakan dana dari APBD, sehingga perlu ada pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu, konsep pengukuran kinerja juga perlu diterapkan (Andriani, 2012). Konsep *value for money* pada pengelolaan organisasi sektor publik memfokuskan dalam “3 elmen utama: ekonomis, efisiensi, serta efektifitas” (Mardiasmo, 2009). Meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memastikan tercapainya tujuan yang ditetapkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kesadaran penggunaan dana publik sebagai landasan akuntabilitas publik merupakan keuntungan dari nilai uang (Nahdia & Sugiartono, 2023). Agar dapat menerapkan *value for money*, maka harus terpenuhi tujuan-tujuan berikut: ekonomi (hemat-hati-hati), alokasi sumber daya dan efisiensi pengadaan (efektif), dan maksimalisasi hasil (maksimalisasi laba, minimalisasi biaya), serta pencapaian tujuan dan target yang efektif (Karina & Ramadhani, 2022).

Kemajuan dan pertumbuhan suatu wilayah bergantung pada sejauh mana wilayah tersebut mampu meningkatkan PAD (Machmud & Radjak, 2018). Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting bagi negara berkembang, karena mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan kemajuan pembangunan dan peningkatan independensi keuangan dari pemerintah pusat, dengan kepatuhan terhadap regulasi seperti SAP sebagai indikatornya. Manajemen keuangan yang efektif dijadikan harapan untuk bisa terwujud di pemerintah

daerah sebagai upaya guna mendorong pertumbuhan serta kemajuan daerah tersebut (Ardelia et al., 2022). Nasib suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kinerja keuangan pemerintahan daerahnya. Bergantung pada seberapa baik suatu daerah mengelola uangnya, daerah tersebut dapat menjadi kuat dan berpotensi besar (Nuraafiyah & Abdullah, 2021).

Daerah membutuhkan evaluasi dalam menilai apakah pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan efisien serta efektif. Penilaian ini Diterapkan pada pengaturan finansial regional yang sebagai instrumen kebijakan pemerintah diharapkan mampu mencerminkan kinerja yang optimal. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai secara internal dan menggerakkan roda perekonomian, agar dapat diharapkan menciptakan efek domino yang positif (Korompot & Warongan, 2017). Dalam Undang-Undang Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus diimplementasikan dengan transparan, terorganisir, berkomitmen, dan sesuai dengan regulasi. Selain itu, pengelolaan tersebut juga perlu dilakukan secara efisien dengan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, kepentingan masyarakat, prinsip keadilan, serta pemerataan. Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama, termasuk ketergantungan pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat, seperti “Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)”. Ketergantungan ini dapat menghambat upaya daerah guna meningkatkan PAD seta kemandirian fiskal (Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional, 2023; Nurkhayat et al., 2018). Selain itu, ketidakpastian dalam jumlah dan waktu pencairan dana dapat mengganggu perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Kesenjangan fiskal antar daerah juga masih menjadi masalah, dengan beberapa daerah kesulitan mencapai tingkat pelayanan publik yang setara.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan salah satu pilar utama dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mewujudkan pembangunan ini melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, realisasi belanja modal yang direncanakan mengalami tantangan yang signifikan.

Salah satu isu utama yang dihadapi adalah penurunan realisasi belanja modal pemerintah. Berdasarkan berita dari CNN Indonesia, pada semester I tahun 2019, realisasi belanja modal pemerintah Indonesia mengalami penurunan sebesar 15 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk proses administrasi yang kompleks dan keterlambatan pencairan anggaran. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan serta berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi daerah (Rika, 2019).

Penurunan realisasi belanja modal ini mempunyai dampak yang luas berkaitan dengan hasil keuangan pemerintah lokal. Infrastruktur yang kurang memadai akibat penurunan belanja modal dapat menghambat aktivitas ekonomi dan menurunkan pendapatan asli daerah (PAD). Di samping itu, "BM" yang tidak optimal juga berdampak pada dana perimbangan yang diberikan untuk daerah-daerah. Dana perimbangan yang berkurang mengakibatkan daerah kesulitan dalam membiayai proyek-proyek pembangunan yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketidakmampuan daerah dalam merealisasikan belanja modal ini menunjukkan terdapat masalah serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan juga terpengaruh karena keterbatasan dana yang tersedia untuk melibatkan mereka secara aktif. Masyarakat yang seharusnya dapat berperan sebagai pengawas dan pelaku dalam pembangunan menjadi terbatas dalam partisipasinya. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting dalam

memastikan bahwa proyek-proyek yang dijalankan Selaras dengan harapan dan kebutuhan masyarakat setempat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penghasilan yang dihasilkan oleh sebagian daerah dan dipungut berdasarkan kebijakan yang diatur dalam regulasi daerah yang selaras aturan hukum yang berlaku (Digdowiseiso et al., 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni elemen penting yang mendukung kemandirian suatu wilayah. Berdasarkan UU No.1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 20, PAD mencakup pemasukan dari pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh otoritas memiliki kewenangan. Pendapatan Asli Daerah yakni sebuah rujukan pemasukan daerah yang memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan. Sumber ini berasal dari potensi pendapatan daerah yang dioptimalkan serta dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah sejalan pada ketentuan hukum yang berlaku (Digdowiseiso et al., 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai alokasi dana antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah, serta pendapatan lain yang sah. Dengan demikian, kemampuan suatu wilayah dalam mengoptimalkan PAD akan memengaruhi kemajuan serta pembangunan wilayah itu (Andjarwati et al., 2021). Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap APBD, semakin berkurang keterikatan terhadap subsidi dari pemerintah pusat. PAD punya kontribusi utama bagi pemerintah daerah karena bisa digunakan sesuai kebutuhan untuk menjalankan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Darwanis & Saputra, 2014). "PAD" mengalami peningkatan signifikan, terutama melalui sektor pajak daerah dan retribusi daerah, menunjukkan upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan kemandirian fiskal (Nafiah & Evita Dyah Wardhani, 2023). Belanja Modal juga meningkat, terutama digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik (Afirman et al., 2023)

Pertumbuhan serta pembangunan sebuah daerah sangat ditentukan oleh kapasitas suatu wilayah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar kontribusi PAD terhadap (APBD), makin kecil tergantung fiskal pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Hal ini mencerminkan tingkat kemandirian daerah, yang menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan yang maksimal (Machmud & Radjak, 2018). Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemakmuran suatu wilayah. Melalui PAD yang tinggi dan pengelolaan yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan dan memenuhi pelayanan kepada masyarakatnya (Chaerani & Firmansyah, 2024). Pengukuran kinerja keuangan melibatkan tiga rasio utama, yaitu rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi (Ayu, 2018). PAD ialah salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. PAD bisa dipakai sebagai indikator guna menilai kinerja dan kemandirian suatu daerah untuk mengelola keuangan (Simamora & Budiwitjaksono, 2022). Jika PAD suatu daerah dapat meningkatkan penerimaan belanja daerah secara signifikan, maka dapat dikatakan cukup maju dan sejahtera secara ekonomi, begitu pula sebaliknya (Rustiyani & Irene Sukma Lestari Barus, 2023). Peningkatan pendapatan di suatu kawasan memberikan peluang lebih besar untuk memajukan ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Mamuka et al., 2019). Kinerja keuangan suatu daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola potensi wilayahnya, khususnya dalam mengoptimalkan perolehan dan distribusi Pendapatan Asli Daerah (Apridiyanti, 2019).

PAD dan BM memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. PAD, yang berasal dari pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya, membantu memaksimalkan kemandirian fiskal daerah, menurunkan ketergantungan pada transfer pusat, dan menyediakan dana yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan lokal (Lathifa & Haryanto, 2019). Peningkatan PAD memungkinkan daerah untuk lebih fleksibel dalam merencanakan dan melaksanakan program

pembangunan yang selaras sama kebutuhan masyarakat setempat. Sementara itu, Belanja Modal yang dipakai bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan, berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah (Karlinda et al., 2021).

Investasi dalam belanja modal juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi swasta (Lathifa & Haryanto, 2019). Dengan demikian, kombinasi peningkatan PAD dan alokasi belanja modal yang optimal bisa memperkuat kinerja keuangan daerah secara keseluruhan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan berkelanjutan (Karlinda et al., 2021). Beberapa studi terdahulu seperti yang diproses (Ardelia et al., 2022) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut (Thalib & Ekaningtias, 2019) dalam studi bahwa Besarnya Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak yang kurang menguntungkan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dimana semakin naik pendapatan asli daerah yang dihasilkan, maka makin rendah nilai kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan tingkatan efisiensi kinerja keuangan yang semakin baik. Besarnya penghasilan yang diperoleh manajemen pemerintah daerah punya pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. ketidaksamaan lain, yakni dari penelitian (Azhar, 2021; Rustiyani & Irene Sukma Lestari Barus, 2023) yang mengutarakan bahwa “pad” tidak memiliki dampak terhadap kinerja keuangan.

Belanja modal menjadi salah satu ukuran produktivitas dalam pemanfaatan anggaran oleh pemerintah daerah (Digdowiseiso et al., 2022). Belanja modal ialah pengeluaran pemerintah daerah untuk aset tetap yang manfaatnya berlangsung lama anggaran dan digunakan untuk pembangunan daerah, menambah aset sesuai kebutuhan masyarakat. Peningkatan belanja modal berdampak pada masa depan dengan meningkatkan produktivitas masyarakat serta menarik investor (Arsallya et

al., 2021). Belanja modal digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau lebih untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah (Zein & Septiani, 2024). Pesatnya pembangunan melalui penggunaan alokasi belanja modal diantisipasi. dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan, terutama di bidang keuangan. Pesatnya pertumbuhan pembangunan yang berasal dari alokasi belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kemandirian wilayah dalam mendanai berbagai aktivitasnya, khususnya di bidang keuangan (Darwanis & Saputra, 2014).

Belanja adalah faktor penting bagi masyarakat untuk mencapai kemakmuran. Di sisi lain, pendapatan menjadi kunci dalam pengelolaan, yang dapat bersumber dari potensi daerah yang kaya. Kebanyakan pengeluaran diperuntukkan untuk belanja modal sebab berdampak pada kemajuan ekonomi daerah dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi. Pengeluaran ini penting karena alokasi anggaran daerah disesuaikan dengan pertumbuhan dan kebutuhan masyarakat, memperkuat prospek pertumbuhan melalui penggunaan modal yang efisien. Faktor penentu utama dari anggaran daerah alokasi belanja modal adalah rasio ketergantungan dan efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (Andjarwati et al., 2021). Kinerja keuangan yang baik di tingkat daerah dapat mempengaruhi porsi belanja modal untuk sumber daya publik (Riswan & Anthony Affandi, 2014). Kinerja keuangan pemerintah daerah bisa dipengaruhi belanja modal, menurut (Digdowiseiso et al., 2022; Lathifa & Haryanto, 2019) maka Belanja modal pengaruhi positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, (Thalib & Ekaningtias, 2019) menyatakan bilamana besar kecilnya belanja modal tidak berpengaruh atas kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dana perimbangan yakni dana yang didistribusikan dari pemerintah pusat ke daerah yang hendak digunakan guna membiayai tindakan daerah itu supaya tercapai sasaran pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mutu pelayanan (Andaresta et al., 2021). Dana perimbangan berfungsi sebagai tambahan anggaran untuk pengurangan

ketimpangan pembiayaan pada pemerintah pusat serta daerah, serta diantara berbagai wilayah (Wahyudin & Hastuti, 2020). Dana perimbangan terdapat “Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH)” (S. P. Putri & Ratnawati, 2023). Kemampuan setiap wilayah dalam menjalankan & mewujudkan kemandirian wilayah memungkinkan dievaluasi melalui ukuran keberhasilan keuangan yang dianalisis dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah (S. P. Putri & Ratnawati, 2023).

Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus ialah bagian integral lewat APBD, baik di jenjang Provinsi, Kota, ataupun Kabupaten, yang berasal dari dana perimbangan (Machmud & Radjak, 2018). Pemerintah dapat memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian daerah. DAU berperan dalam pemerataan keuangan antardaerah & digunakan bagi mendanai kebutuhan belanja pemerintah daerah terkait pelaksanaan desentralisasi (Simamora & Budiwitjaksono, 2022). Pendanaan ini diperoleh dari penerimaan APBN yang ditujukan untuk memastikan distribusi keuangan yang merata antarwilayah, sehubungan beserta pelaksanaan distribusi wewenang dan pengalokasian dana guna memenuhi kebutuhan daerah (B. I. Sari & Halmawati, 2021). Manajemen pengeluaran yang efektif menghasilkan nilai ekonomi yang optimal dan mempermudah proses evaluasi mengenai performa finansial pemerintah daerah secara lebih baik (Nauw & Riharjo Ikhsan Budi, 2021).

Dana Perimbangan, yang mencakup DAU DAK terus meningkat sehingga menjadi komponen utama dalam pendapatan daerah (Nafiah & Evita Dyah Wardhani, 2023). Kinerja fiskal daerah menunjukkan perbaikan dengan peningkatan realisasi pendapatan dan belanja, serta beberapa provinsi mencapai surplus anggaran. Tantangan utama adalah ketergantungan pada transfer pusat dan fluktuasi pendapatan dari sektor tertentu, sementara peluang peningkatan kinerja termasuk diversifikasi

sumber pendapatan dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah (Afirman et al., 2023; Nafiah & Evita Dyah Wardhani, 2023).

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal, Dana Perimbangan juga pengaruhi hasil finansial pemerintah daerah. (Ardelia et al., 2022; Thalib & Ekaningtias, 2019) menunjukkan Dana Perimbangan mempunyai kaitan negatif serta dalam kinerja keuangan pemerintah daerah, dimana kenaikan dana perimbangan yang diberi oleh pemerintah pusat, sehingga kian rendah nilai kinerja keuangan pemerintah daerah yang menyatakan level kinerja keuangan yang semakin baik. Penyaluran dana perimbangan pada pemerintah pusat ke pemerintah daerah berfungsi guna menutupi dan mengurangi ketimpangan anggaran, sehingga bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan operasi bisnis guna meningkatkan kinerja keuangan mereka. Perolehan penelitian lain dari (Nauw & Riharjo Ikhsan Budi, 2021; Yuliawati et al., 2024) menyatakan jika Dana perimbangan tidak memberikan dampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini terbukti melalui asumsi bahwasannya pengelolaan dana perimbangan oleh pemerintah daerah belum menjadi faktor penentu dalam kinerja keuangan mereka.

Partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan aktif warga dalam aktivitas pemerintahan, yang berkontribusi pada evaluasi dan pengawasan kinerja pemerintah serta mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. (Putra & Rasmini, 2019). Hasil penelitian yang lain (Yunita & Rasmini, 2018) menunjukkan partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah ke KK pemerintah daerah, partisipasi masyarakat menguatkan pengaruh dana perimbangan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. partisipasi masyarakat mendukung dampak belanja modal dalam efisiensi keuangan daerah. Akan tetapi, hasil lain dari (Maulida'arifina, 2024) menyatakan keterlibatan masyarakat dapat berfungsi sebagai moderasi yang melemahkan dampak Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah. Namun, keterlibatan masyarakat tidak memiliki

pengaruh moderasi mengenai kaitan antara belanja modal & kinerja keuangan.

Studi mengenai faktor-faktor yang memberi pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah adalah topik yang menarik dalam dieksplorasi, dikarenakan aspek keuangan sering kali dianggap sensitif dan memerlukan analisis mendalam. Studi yang telah dilaksanakan (Ardelia et al., 2022) dalam mengukur variabel kinerja keuangan memakai 3 rasio, yaitu “rasio kemandirian, ketergantungan, serta desentralisasi”. Penelitian (Mulyani & Wibowo, 2017) menggunakan menggunakan rasio efisiensi untuk menghitung kinerja keuangan. Sedangkan, penelitian lain dari (Zein & Septiani, 2024) kinerja keuangan diuji melalui rasio kemandirian, efektivitas, desentralisasi fiskal, dan ketergantungan. Sedangkan, dalam variabel itu peneliti menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan rasio efisiensi. Efisiensi juga berhubungan pada biaya yang muncul untuk melaksanakan kegiatan industri (Bakhitah & Ryandono, 2020).

Urgensi penelitian ini terletak pada pengembangan variabel moderasi partisipasi masyarakat. Penambahan variabel partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi memberikan kontribusi tambahan, di mana keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pemerintahan berpotensi memperkuat dampak belanja modal terhadap kinerja keuangan melalui kontrol sosial, keterbukaan dan tanggung jawab, sehingga mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih responsif dan bertanggung jawab. Kemudian, Keterlibatan masyarakat mencerminkan kontribusi mereka dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara, yang diwujudkan melalui pembayaran pajak. Seiring meningkatnya penerimaan pajak dari masyarakat, semakin besar pula peran serta mereka dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah (Yunita & Rasmini, 2018). Penelitian ini melibatkan seluruh wilayah Indonesia untuk menangkap kompleksitas yang lebih luas, berbeda dengan observasi

terdahulu yang biasanya hanya berfokus pada salah satu wilayah provinsi, kabupaten, atau kota.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, sehingga akan dilakukan observasi dalam judul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk latar belakang yang sudah dijelaskan, sehingga kerangka masalahnya sebagaimana dirinci:

- 1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berdampak pada kinerja keuangan?
- 2) Apakah Belanja Modal berdampak pada kinerja keuangan?
- 3) Apakah Dana Perimbangan berdampak pada kinerja keuangan?
- 4) Apakah Partisipasi Masyarakat memoderasi dampak Pendapatan Asli Daerah pada kinerja keuangan?
- 5) Apakah Partisipasi Masyarakat memoderasi dampak Belanja Modal pada kinerja keuangan?
- 6) Apakah Partisipasi Masyarakat memoderasi dampak Dana Perimbangan pada kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dari riset ini meliputi:

- 1) Untuk Mengetahui Dampak Pendapatan Asli Daerah pada Kinerja Keuangan
- 2) Untuk Mengetahui Dampak Belanja Modal pada Kinerja Keuangan
- 3) Untuk mengetahui Dampak Dana Perimbangan pada Kinerja Keuangan
- 4) Untuk mengetahui Dampak Partisipasi masyarakat untuk memoderasi Pendapatan Asli Daerah pada kinerja keuangan
- 5) Untuk mengetahui Dampak Partisipasi masyarakat untuk memoderasi Belanja Modal pada kinerja keuangan

- 6) Untuk mengetahui Dampak Partisipasi masyarakat untuk memoderasi Dana Perimbangan pada kinerja keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Studi berikut bias memperbanyak literatur terkait pengelolaan keuangan daerah, terkhususnya dalam konteks Indonesia. Ini membantu memahami bagaimana variabel seperti Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, & Partisipasi Masyarakat sebagai variabel moderasi, berpengaruh terhadap evaluasi keuangan daerah.
- 2) Studi ini menyerahkan kontribusi pada pengembangan metode *Value for Money* dalam evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan penekanan pada efektivitas dalam penggunaan sumber daya publik, serta peran moderasi partisipasi masyarakat dalam memperkuat hubungan antara variabel- variabel tersebut.
- 3) Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas desentralisasi fiskal di Indonesia, dengan melihat bagaimana otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan berdampak pada kinerja keuangan, serta bagaimana partisipasi masyarakat dapat memoderasi dampak ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Pemerintah daerah dapat menggunakan temuan observasi berikut untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran, dengan fokus pada optimalisasi PAD, alokasi belanja modal yang efektif, pemanfaatan dana perimbangan secara efisien, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Temuan pada observasi berikut bisa dijadikan pedoman oleh para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait pengelolaan keuangan daerah, dengan memperhatikan peran penting partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kinerja keuangan dan pelayanan publik.

- 3) Pemerintah daerah dapat menggunakan teknik *Value for Money* yang diusulkan dalam observasi berikut dalam mengevaluasi kinerja keuangan mereka secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan variabel moderasi partisipasi masyarakat, sehingga dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan meningkatkan akuntabilitas.
- 4) Dengan penerapan metode *Value for Money* dan peningkatan partisipasi masyarakat, pemerintah daerah bisa meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan, yang pada gilirannya dapat menaikkan kepercayaan.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun Batasan observasi berikut terletak dalam Wilayah Provinsi di Indonesia yang menyajikan Data Laporan Realisasi APBD di Web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan periode 2019-2023.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Studi mendatang akan sangat terbantu oleh panduan dan dasar yang telah disediakan oleh studi-studi terdahulu, yang bisa mempermudah penulis dalam merancang kerangka konseptual terhadap investigasi yang direncanakan. Studi-studi sebelumnya yang relevan pada topik observasi berikut meliputi:

Tabel 2.1

Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode & Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Faiz Zamzami Fuad Rakhman (2023) Determinants of Local Government Financial Performance in Indonesia	1. Variabel Bebas (Independen): • X1: Ukuran Daerah • X2: Belanja Modal • X3: Kualitas Pelaporan keuangan • X4: Rekomendasi Audit • X5: Masalah Cakrawala	1. Metode kuantitatif 2. Penelitian ini menggunakan data panel yang mencakup observasi dari berbagai pemerintah daerah di Indonesia 3. Studi ini memakai data panel yang mencakup observasi	1. “Hasil analisis menunjukkan jika ukuran pemerintah daerah serta kualitas laporan keuangan dampak positif pada kinerja keuangan. Sebaliknya, bm dapat berhubungan negatif dengan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode & Analisis Data	Hasil Penelitian
		2. Variabel Terikat (Dependen): <ul style="list-style-type: none"> • Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	selama periode tertentu (misalnya, dari 2012 hingga 2019) untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja keuangan.	kinerja keuangan 2. Ini berarti bahwa meskipun pengeluaran modal penting untuk pembangunan infrastruktur, efisiensi dalam penggunaan sumber daya juga sangat penting untuk meningkatkan pendapatan lokal".
2.	Ika Novita Ardelia Hilda Kumala Wulandari Yenny Ernitawati Dumadi (2022) Pengaruh Pendapatan	3. Variabel Bebas (Independen): <ul style="list-style-type: none"> • X1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) • X2: Belanja Modal • X3: Dana Perimbangan 	1. Metode kuantitatif dengan pendekatan empiris 2. Menggunakan Regresi Linear Berganda 3. Data yang digunakan adalah data sekunder	1. "Penghasilan Asli Daerah mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Belanja modal tidak berdampak pada kinerja

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode & Analisis Data	Hasil Penelitian
	Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016 – 2020)	4. Variabel Terikat (Dependen): 5. Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	berupa lpran realisasi APBD dari tahun 2016 hingga 2020, Kota dan Kabupaten di eks Karesidenan Pekalongan. 4. Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS versi 25. 5. Uji yang Dilakukan: Pengujian F (Simultan), Pengujian Koefisien Determinasi (Adjusted R Square), Pengujian Signifikansi Parsial	keuangan pemerintah daerah. 3. Dana perimbangan berdaampak dalam kinerja keuanagan. 4. Hubungan secara bersamaan pada Penghasilan Asli Daerah, belanja modal, serta dana perimbangan pad kinerja keuangan pemerintah daerah”.
3.	Winanda Chyntia Simamora Gideon Setyo Budiwitjaksono	1. Variabel Independen: • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum	1. Metode kuantitatif 2. Analisis Data Sekunder 6. Analisis data menggunakan deskriptif,	1. “Dampak penghasilan asli daerah serta belanja modal terhadap kinerja

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode & Analisis Data	Hasil Penelitian
	(2022) Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal 2. Variabel Dependen: 6. Kinerja Keuangan	pengujian asumsi klasik, pengujian regresi linear berganda, pengujian F (simultan), pengujian t (parsial), & pengujian koefisien determinasi.	finansial Pemda sedangkan dana alokasi umum tidak memberikan pengaruhnya pada kinerja keuangan pemerintah daerah”.
4.	Maharani Artga Khrisnadewi Prapties (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap	1. Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh Penghasilan Asli Daerah • Belanja Modal • Belanja Pegawai 2. Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	1. Kajian statistik deskriptif 2. Data sekunder pada Laporan Realisasi APBD 3. Analisis Regresi Linier Berganda	“Pendapatan asli daerah (PAD) berdampak pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Belanja modal berdampak pada kinerja keuangan. Bp tidak memiliki dampak terhadap kinerja

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode & Analisis Data	Hasil Penelitian
	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013 s/d 2016)			keuangan pemerintah daerah”.
5.	<p>Tri Andjarwati Endah Budiarti Pramita Studiviany Soemadijo Muhammad Yasin (2021)</p> <p><i>Analysis of Local Own Revenue and Balancing Funds on the Financial Performance of Districts and Cities in the Region of East Java Province</i></p>	<p>1. Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan Asli Daerah • Dana Perimbangan <p>2. Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan 	<p>1. Metode kuantitatif dan kualitatif dengan 19aria pada analisis kuantitatif.</p> <p>2. Analisis data menggunakan Regresi Kuadrat Terkecil Parsial (Partial Least Squares/PLS).</p> <p>3. Penelitian ini menggunakan t-statistik untuk</p>	<p>Dampak penghasilan asli daerah serta belanja modal terhadap kinerja finansial Pemda namun dana alokasi umum tidak beri pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah .</p>

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode & Analisis Data	Hasil Penelitian
			menilai signifikansi hubungan antar variabel.	
6.	Putu Venny Yunita Ni Ketut Rasmini (2020) Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan	1. Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Perimbangan • Belanja Modal 2. Variabel Dependen: Kinerja Keuangan 3. Variabel Moderasi: Partisipasi Masyarakat	1. Observasi berikut yaitu observasi kuantitatif dalam pendekatan asosiatif 4. Analisis data dilakukan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA).	1. “Pendapatan Asli Daerah serta Belanja Modal memiliki pengaruh positif dalam kinerja keuangan. 2. Dana Perimbangan tidak memiliki dampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. Partisipasi Masyarakat memperkuat dampak penghasilan Asli Daerah, Dana Perimbangan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode & Analisis Data	Hasil Penelitian
				n, serta Belanja Modal alam kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya, adanya ikutserta masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana-dana tersebut dalam meningkatkan performa keuangan pemerintah daerah”
7.	Nuwun Priyono Ari Nurul Fatimah Yulida Army Nurcahya (2020) Pengaruh PAD dan	1. Variabel Independen: • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Perimbangan 2. Variabel Dependen:	1. Informasi yang dijadikan bahan dalam penelitian ini. adalah data sekunder 2. Metode peneitian	4. “DAU, serta DAK dengan parsial berpengaruh dalam kinerja keuangan daerah, namun dengan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode & Analisis Data	Hasil Penelitian
	Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan sejahtera Masyarakat di Jawa Tengah	4. Kinerja Keuangan	yang dipakai yaitu observasi menggunakan model regresi linear berganda. 3. Menggunakan model Teknik analisis regresi berganda	stimultan PAD, DBH, DAU,serta DAK berpengaruh pada kinerja keuangan daerah. Hasil observasi yang lain menunjukkan jika dengan parsial hanya terdapat dua variabel PAD serta DAU yang berpengaruh dalam level kesejahteraan masyarakat. Namun itu dengan simultan variabel PAD, DBH, DAU dan DAK

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode & Analisis Data	Hasil Penelitian
				berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat”.
8.	Firmansyah Thalib Diah Ekaningtias (2019) <i>The Effect of Original LG Revenue, Balancing Fund, and Capital Expenditure on LG Financial Performance in Regencies in East Java Province</i>	1. Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan Asli Daerah • Dana Perimbangan • Belanja Modal 2. Variabel Y: <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan 	1. Data analisis dengan menggunakan Kajian Regresi Linier Berganda dalam SPSS 23. Melalui tahap-tahap: Uji Statistik Deskriptif, Normalitas, Multikolinearitas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Pengujian Koefisien Determinasi (R ²), Pengujian Statistik F (Anova), Pengujian Statistik T, Kajian	“Penghasilan Asli Daerah serta Dana Perimbangan mempunyai dampak dalam kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara belanja modal tidak menunjukkan pengaruhnya untuk kinerja keuangan tersebut”

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode & Analisis Data	Hasil Penelitian
			Regresi Linier Berganda.	
9.	Pesi Suryani (2019) “Pengaruh Partisipasi Publik, Akuntabilitas, Transparansi dan Integritas terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah”	1. Variabel Independen: • Pengaruh Partisipasi Publik • Akuntabilitas • Transpaansi • Integritas 2. Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	Teknik Analisis Regresi Linier Berganda	“Temuan dari observasi berikut mengindikasikan bahwa partisipasi public, akuntabilitas, transparansi dan Identitas terdapat pengaruh yang menguntungkan pada kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah”.
10.	Joice Machmud Lukfiah Irwan Radjak (2018) “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana	3. Variabel X: • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum • Dana Alokasi Khusus 4. Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	1. Pendekatan Penelitian Kuantitatif dengan Alat Analisis Regresi Berganda, mencakup 2. : Pengujian Parsial (Pengujian T), serta Pengujian Simultan	“Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial Variabel PAD (X1) tak menunjukkan dampak pada kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo. Variabel DAU (X2) juga

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode & Analisis Data	Hasil Penelitian
	Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo”		(Pengujian F) 3. Data Sekunder Internal Kuantitatif 4. Teknik pengumpulan data dengan Observasi dan Dokumentasi	tidak memberikan dampak dalam kinerja keuangan di wilayah tersebut. Namun, Variabel DAK (X3) mempunyai dampak pada kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo. Dengan seluruhan, variabel-variabel PAD, DAU, serta DAK dengan bersama-sama memengaruhi variabel dependen”.
1	Sri Mulyani Hardiyanto Wibowo (2017) “Pengaruh Belanja Modal, Ukuran	1. Variabel Independen: • Belanja Modal • <i>Intergovernmental Revenue</i> • Ukuran Pemerintah Daerah	1. Metode kuantitatif 2. Teknik kajian Regresi Linier Berganda 3. Teknik pengambilan sampel	“Belanja modal memiliki pengaruh positif dalam kinerja kk daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode & Analisis Data	Hasil Penelitian
	Pemerintah Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015”	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan Asli Daerah 2. Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan 	pada observasi berikut menggunakan sensus	Sementara itu, variabel intergovernmental revenue, ukuran pemerintah daerah, erta penghasilan asli daerah menyatakan dampak yang bervariasi dalam kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di kawasan tersebut”.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Berlandaskan (M. C. Jensen & Meckling, 1976), kaitan keagenan yaitu kontrak pada prinsipal serta agen yang mencakup pedelegasian berkuasa pengambilan keputusan terhadap agen. Agen, dalam hal ini manajer, bertanggung jawab secara moral guna memaksimalkan keuntungan prinsipal, namun mereka juga memiliki kepentingan pribadi untuk meningkatkan kemakmuran pribadi mereka. Teori keagenan juga relevan untuk sektor publik. Pada negara demokratis, kaitan keagenan terjadi pada masyarakat (prinsipal) serta pemerintah (agen) / antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Teori keagenan mengkaji hubungan antara prinsipal, yang mendelegasikan wewenang, & agen, yang

memiliki akses informasi berbeda (Dewata et al., 2021). Berlandaskan (R. A. R. Putri & Amanah, 2020) perbedaan informasi ini bisa menyebabkan penipuan atau korupsi oleh agen. Teori ini mengasumsikan bahwa untuk mengurangi potensi penipuan, akuntabilitas harus tersebar di berbagai daerah, meningkatkan efisiensi melalui checks and balances. Pemerintah daerah sebagai agen sadar akan kepentingan masyarakat, tetapi masyarakat mungkin tidak selalu percaya mereka bekerja demi kepentingan terbaik mereka. Umpan balik warga diharapkan mengurangi asimetri informasi dan menyeimbangkan responsibilitas antara daerah dan otoritas lokal.

Menurut teori agensi, pemerintah daerah berperan sebagai agen yang mewakili masyarakat sebagai prinsipal. Sebagai pihak yang dipercaya, agen bertanggung jawab dalam mengelola aset dengan tujuan meningkatkan pendapatan principal (Ardelia et al., 2022). Pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan sumber daya tambahan yang tersedia pada kabupaten khusus (Aulia & Rahmawaty, 2020). Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan menunjukkan bahwa pemerintah sebagai agen perlu menetapkan strategi untuk memberikan pelayanan baik kepada masyarakat sebagai prinsipal. Masyarakat, sebagai prinsipal, mengharapkan kinerja yang baik dari pemerintah yang terwujud dalam dokumen keuangan serta kualitas pelayanan yang optimal. Kualitas laporan keuangan dan pelayanan ini tergantung pada pendekatan yang dijalankan oleh pemerintah. Jika pemerintah menunjukkan kinerja yang baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah (Thalib & Ekaningtias, 2019).

2.2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Aturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan serta Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja didefinisikan sebagai hasil maupun keluaran pada suatu aktivitas maupun rencana yang direncanakan maupun sudah dilaksanakan, mengacu pada pemakaian dana yang terukur dari segi kuantitas & kualitas. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu gambaran level perolehan untuk pengelolaan keuangan daerah,

mencakup aspek penghasilan serta belanja daerah, yang dievaluasi berdasarkan sistem keuangan yang telah diatur melalui kebijakan atau peraturan perundang-undangan dalam masa alokasi anggaran tertentu (Thalib & Ekaningtias, 2019).

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, sesuai apa aturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2, mengutamakan proses manajemen yang berkelanjutan dan terencana secara baik. Berikut karena tahapan perencanaan, pelaksanaan, & pengawasan keuangan daerah diasumsikan sebagai satu kesatuan yang integral (Maulina et al., 2021). Kinerja pemerintahan daerah sangat terkait sama kinerja pengelolaan keuangannya (Wahyudin & Hastuti, 2020). Ungkapan berikut terkait pada yang disampaikan (Dewata et al., 2021), menyebutkan jika penilaian kinerja keuangan dilaksanakan melalui parameter keuangan selama periode tertentu.

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yakni sarana penghasilan pemerintah daerah yang berasal pada aktivitas ekonomi daerah ini sendiri (Thalib & Ekaningtias, 2019). Menurut UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 20, "PAD" yakni penghasilan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, pengelolaan aset daerah yang terpisah, serta berbagai penghasilan asli daerah lainnya yang selaras dengan ketentuan hukum. Istilah ini mengacu pada peningkatan pendapatan yang diperoleh dari jenis-jenis tersebut (Ardelia et al., 2022). Pendapatan daerah ini diperoleh melalui optimalisasi arus kas daerah dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan publik (Andjarwati et al., 2021).

2.2.4 Belanja Modal

Belanja modal yaitu biaya yang diarahkan dalam investasi produktif yang dinilai berdasarkan efektivitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan local (Digdowiseiso et al., 2022). Belanja modal mengacu pada akuisisi aset tetap yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengeluaran anggaran (Wahyudin & Hastuti, 2020). Pengeluaran

modal meliputi pembelian aset jangka panjang serupa bangunan, tanah, peralatan, serta barang tidak berbentuk. Berikut merupakan bagian dari pengertian pengeluaran tersebut (Maulina et al., 2021).

2.2.5 Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu pembiayaan daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta peningkatan kesuksesan (Andaresta et al., 2021). Dana perimbangan yaitu kontributor utama bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang berasal dalam sumber penghasilan daerah. Peningkatan kinerja keuangan dapat dicapai oleh pemerintah daerah melalui pengelolaan keuangan yang baik sejalan dengan peraturan daerah (Nugraha, 2019). Pendapatan yang mencakup pada dana perimbangan terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2022 terkait Hubungan Keuangan pada otoritas nasional serta lokal yang tersusun atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu komponen dari TKD yang dialokasikan berlandaskan persentase tertentu dari penghasilan pada APBN serta kinerja terkait, yang ditujukan untuk daerah penghasil sebagai upaya pengurangan ketimpangan fiskal pada Pemerintah dan Daerah. Selain itu, DBH juga diberikan kepada daerah nonpenghasil untuk mengatasi pengaruh buruk eksternal dan/atau mendorong pemerataan pada suatu kawasan .
2. Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu elemen pada TKD yang dialokasikan untuk mereduksi ketimpangan dalam kapasitas keuangan serta kualitas pelayanan publik antar wilayah .
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu bagian pada Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang disalurkan dalam pembiayaan program, kegiatan, maupun kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan menunjang operasional layanan publik, dengan penggunaannya yang sudah ditentukan oleh Pemerintah .

2.2.6 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah bentuk kontribusi aktif dari warga dalam aktivitas pemerintahan, yang berperan dalam evaluasi serta pengawasan kinerja pemerintah, sekaligus mengurangi kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan. (Putra & Rasmini, 2019). Untuk perwujudan anggaran yang fektif, ikutserta masyarakat sangat penting pada proses anggaran penghasilan serta belanja daerah serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di lapangan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembayaran pajak membantu pemerintah daerah guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah, karena dengan laangsung peningkatan penghasilan asli daerah. Maka demikian, diharapkan partisipasi masyarakat bisa mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah (Yunita & Rasmini, 2018).

2.3 Kinerja Keuangan dalam Perspektif Islam

Ekonomi Islam menekankan bahwa negara memiliki peran penting untuk melanjutkan misi kenabian dengan mencapai tujuan syariah (*al-maqashid al-syari'ah*). Negara bertindak selaku agen Tuhan dalam realisasi tujuan Syariah, yang mencakup keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Sebagai komponen penting dalam kebijakan publik, keadilan dan kesetaraan harus tercermin dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam pengalokasian sumber daya publik. Alokasi sumber daya yang tidak sejalan pada tujuan Syariah tidak diperbolehkan, disebabkan hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Pengelolaan keuangan publik, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab al-Amwal, mencakup tiga jenis harta sebagai sumber utama keuangan negara, yaitu zakat, fa'i, dan khumus (M. Ghazali, 2018). Zakat merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk kepentingan umat, terutama untuk membantu fakir miskin. Sumber keuangan lain ialah fa'i, yakni harta yang didapatkan pada musuh tanpa pertarungan, dan khumus, yakni sepertiga dari harta rampasan perang dan barang tambang. Ketiga jenis hart aini memiliki peran penting dalam menyakinkan jika kekayaan

tidak hanya beredar di kalangan sebagian orang, namun juga terdistribusi dengan merata untuk kemaslahatan umat.

Efektivitas dalam pengelolaan anggaran negara adalah prinsip penting dalam ekonomi Islam. Rasulullah dan Khalifah Umar bin Khattab menjadi contoh ideal untuk mengelola keuangan publik yang berdampak nyata dan berkelanjutan. Salah satu contoh kebijakan yang mencerminkan efektivitas adalah alokasi zakat, di mana dana yang dikumpulkan digunakan secara tepat sasaran untuk memberdayakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan mencapai tujuan sosial yang ditetapkan oleh Syariah. Kebijakan ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan publik..

Ayat Al-Qur'an yang sesuai pada prinsip distribusi asset dalam Islam adalah Surah Al- Hasyr Ayat 7:

السَّبِيلِ وَالَّذِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرْأَىٰ أَهْلٍ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَقَاءَ مَا
 اللَّهُ وَأَنْفُوا فَاَنْتَهُوْا عَنْهُ نَهَكُمْ وَمَا فَخَذُوهُ الرَّسُولُ أَنْتُمْ وَمَا مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءَ بَيْنَ ُ ذُوْلَهُ يَكُوْنَ لَا كِي
 الْعِقَابِ شَدِيْدُ اللَّهِ ۗ إِنَّ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Ny”.

Ayat ini mengfokuskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta menghindari penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Prinsip ini relevan dalam pengelolaan anggaran daerah di Indonesia, di mana sumber daya harus dialokasikan secara merata demi kesejahteraan seluruh masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. Dalam

praktiknya, distribusi yang adil ini dapat diwujudkan melalui penganggaran yang efektif, memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

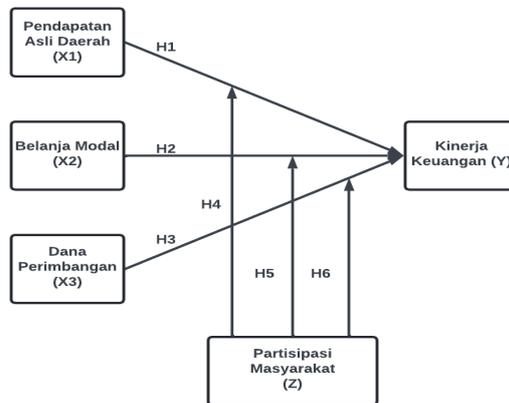
Ibn Kathir menafsirkan bagian ini sebagai rujukan pada distribusi kekayaan fai' yang adil, atau hasil rampasan perang tanpa pertempuran, yang tidak boleh dibatasi hanya pada orang kaya. Tujuannya adalah untuk menghindari ketidakadilan ekonomi dengan mencegah sejumlah kecil orang mengumpulkan kekayaan. Mengembangkan infrastruktur yang mendukung ekonomi lokal, memperluas konektivitas digital untuk menutup kesenjangan pengetahuan, dan mendistribusikan pembangunan infrastruktur secara merata di antara daerah-daerah miskin merupakan langkah-langkah menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk mengurangi ketergantungan, reformasi tata kelola sumber daya alam harus menerapkan konsep keberlanjutan dan keadilan, meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya, dan mendiversifikasi ekonomi di daerah-daerah yang kaya sumber daya. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan dapat membawa Indonesia lebih dekat dalam prinsip keadilan ekonomi yang dijelaskan pada Al-Hasyr ayat 7 (Falah, 2024).

Hak pribadi diakui oleh Islam sebagai perintah dari Allah SWT, tetapi Islam juga mengakui bahwa hak orang lain (orang miskin) termasuk dalam kepemilikan pribadi. Terkait dengan masalah kepemilikan, Islam secara bersamaan mengatur sumber (halal / haram) dan distribusi atau penggunaan produk. Oleh karena itu, meskipun properti itu milik seseorang, itu tidak berarti bahwa ia dapat menggunakannya sesuka hatinya tanpa memperhitungkan potensi manfaat dan bahayanya bagi masyarakat luas.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu sebuah model berfikir yang telah tersusun secara konseptual dan menjelaskan tentang bagaimana teori berkaitan pada banyak faktor yang sudah teridentifikasi selaku permasalahan yang penting (Hermawan & Hariyanto, 2022). Studi ini dilakukan guna menguji Dampak Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal,

serta Dana Perimbangan Pada Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia dalam Partisipasi Masyarakat selaku Variabel Moderasi . Selanjutnya, muncul gagasan kerangka konseptual berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis Penelitian

Jawaban atas rumusan masalah penelitian didasarkan pada teori terkait dan penalaran logis yang belum divalidasi oleh bukti empiris, sehingga hipotesis merupakan solusi jangka pendek (Abdullah et al., 2022). Berikut adalah hipotesis penelitian yang sejalan dengan rumusan masalah serta teori yang sudah dijelaskann:

2.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PAD adalah salah satu srana utama bagi keuangan daerah yang memiliki peran signifikan dalam mendukung pembangunan. Sumber ini dihasilkan dan dioptimalkan pada kemampuan penghasilan daerah, serta diolah secara mandiri oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada (Digdowiseiso et al., 2022). Dengan demikian, semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada APBD, menurunnya bergantung pada pemerintah daerah pada alokasi dana pada pemerintah pusat berkontribusi terhadap perbaikan performa keuangan daerah

(Digdowiseiso et al., 2022). Kemandirian pengelolaan keuangan daerah dikarenakan peningkatan penghasilan asli daerah juga mendukung adanya perkembangan kinerja keuangan daerah. Keahlian Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri semua aktivitasnya membuat kinerja keuangan daerah bertambah baik (Dwigantara & Handayani, 2020). Masyarakat memiliki kemampuan untuk mengawasi manajemen keuangan yang dilaksanakan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pengelolaan keuangan dengan efisien mampu memenuhi sasaran organisasi yang telah dirumuskan (Ardelia et al., 2022).

Hasil studi (Ardelia et al., 2022) menunjukkan “PAD” memiliki hubungan yang positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, observasi (Digdowiseiso et al., 2022) juga menyebutkan Pendapatan Asli Daerah berdampak positif dan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berlandaskan penjelasan tersebut sehingga hipotesis bisa dinyatakan dibawah ini:

H₁: Pengaruh Positif Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.5.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membeli atau membangun aset (Thalib & Ekaningias, 2019; Wahyudin & Hastuti, 2020). Aset ini bisa berupa bangunan, utilitas, atau infrastruktur lainnya. Pengeluaran ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan manfaat langsung maupun tidak langsung (Thalib & Ekaningias, 2019). Dalam konteks teori keagenan, belanja modal dan pengelolaan aset digunakan untuk menyediakan sarana prasarana unggulan untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengolah aset-aset ini dengan hati-hati dikarenakan dana yang digunakan berasal pada manajemen. Pemerintah yang diberi wewenang dalam belanja modal perlu memiliki tanggung jawab atas penjagaan aset tetap (Ardelia et al., 2022). Penggunaan belanja modal yang tepat bisa

meningkatkan penghasilan daerah serta memperbaiki kinerja keuangan (Maulina et al., 2021).

Hasil penelitian (Simamora & Budiwitjaksono, 2022) menyatakan belanja modal berpengaruh dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut (Digdowiseiso et al., 2022) mengungkapkan jika Belanja Modal mempunyai dampak positif dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, (Lathifa & Haryanto, 2019) menyebutkan Belanja modal mempunyai dampak positif terhadap pemerintah daerah. Hipotesis bisa disebutkan dibawah ini.

H₂: Pengaruh Positif Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.5.3 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penghasilan pemerintah daerah yang di transfer oleh pemerintah pusat mempunyai tujuan dalam pengurangan ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pada pusat serta daerah (Thalib & Ekaningtias, 2019). Dana perimbangan akan dimasukkan ke dalam akun penghasilan pemerintah daerah, maka meningkatkan jumlah pendapatan pemerintah daerah. Dalam ini, pemerintah daerah masih bergantung dalam pemerintah pusat. Bertambah tinggi dana perimbangan, maka bertambah rendah kinerja keuangan pemerintah daerah (Thalib & Ekaningtias, 2019). Dalam penutupan kekurangan belanja daerah sehingga pemerintah pusat mentransfer dana pada bentuk dana perimbangan terhadap pemerintah daerah (I. P. Sari, 2016). Pada kaitannya dengan teori keagenan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas kewenangan yang diberikan, yang diwujudkan melalui pengelolaan keuangan yang efisien serta peningkatan kualitas layanan publik secara optimal dan merata (Ardelia et al., 2022).

Hasil penelitian (Ardelia et al., 2022) menyatakan Dana perimbangan menunjukkan korelasi negatif pada performa keuangan pemerintah daerah (Thalib & Ekaningtias, 2019) menyebutkan Dana perimbangan dampak negatif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal

lain, menurut (Rustiyani & Irene Sukma Lestari Barus, 2023) jika Dana perimbangan berdampak pada kinerja keuangan. Hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₃: Pengaruh Negatif Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.5.4 Partisipasi Masyarakat dalam Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, terutama dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan, berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang (Putra & Rasmini, 2019). Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam pembayaran pajak berkontribusi langsung terhadap peningkatan (PAD) dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Yunita & Rasmini, 2018). Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah tidak beroperasi sendirian, melainkan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah bersama-sama bertanggung jawab dan saling mendukung untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan sejahtera. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan daerah dengan mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenaikan PAD ini akan memberikan dampak yang terhadap kinerja pemerintah daerah (Ayu, 2018). Untuk aktif pembayaran pajak daerah, partisipasi masyarakat mempermudah meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan penghasilan daerah ini, pada gilirannya, meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga daerah bisa membayar otonomi sendiri. Bertambah besar PAD serta keikutsertaan masyarakat untuk pembayaran pajak, diinginkan akan meningkat kinerja keuangan pemerintah daerah (Yunita & Rasmini, 2018).

Hasil penelitian (Yunita & Rasmini, 2018) menunjukkan partisipasi masyarakat mendukung dampak penghasilan asli daerah pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Keterlibatan masyarakat dapat berfungsi sebagai moderasi yang melemahkan dampak Pendapatan Asli

Daerah pada kinerja keuangan pemerintah (Maulida'arifina, 2024). Berdasarkan diskusi tersebut, kaitan pada pendapatan asli daerah serta kinerja keuangan yang di moderasi partisipasi masyarakat dapat diformulasikan dalam hipotesis berikut:

H₄: Partisipasi Masyarakat Memperkuat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.5.5 Partisipasi Masyarakat dalam Memoderasi Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

Tujuan dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang tercukupi, yang difasilitasi oleh belanja modal. Tingginya belanja modal mencerminkan banyaknya infrastruktur serta sarana yang berhasil terbangun. Pengelolaan belanja modal yang efisien diyakini mampu memberikan dorongan signifikan terhadap peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi (Dewi & Dicriyani, 2018). Penambahan jumlah proyek pembangunan yang dilakukan berkontribusi pada peningkatan performa keuangan pemerintah daerah. Secara logis, bertambah banyak sumber yang diperoleh, bertambah besar pula hasil yang didapat. Tingginya partisipasi masyarakat untuk pembayaran pajak daerah akan menolong pemerintah pembayaran keperluan belanja modalnya.

Keikutsertaan masyarakat mendukung dampak belanja modal dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Beberapa hasil studi yang dilakukan oleh (Yunita & Rasmini, 2018) Keikutsertaan masyarakat mendukung dampak belanja modal dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil observasi lain mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi kaitan pada belanja modal serta performa keuangan pemerintah daerah (Maulida'arifina, 2024). Dengan kata lain, partisipasi masyarakat memiliki peran dalam memperkuat keterkaitan antara belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Melalui partisipasi tersebut, pemerintah

daerah didorong untuk peningkatan penghasilan daerah, yang nantinya bisa dialokasikan guna peningkatan belanja modal, maka kinerja keuangan daerah mengalami peningkatan. (Dewi & Dicriyani, 2018). Dengan merujuk pada penjelasan tersebut, hipotesis yang disampaikan yaitu sebagai berikut:

H₅: Partisipasi Masyarakat Memperkuat Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.5.6 Partisipasi Masyarakat dalam Memoderasi Pengaruh Dana

Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

Partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak daerah bisa memberi pengaruh jumlah dana perimbangan yang diterima pemerintah kawasan di masa mendatang. Sejalan pada salah satu tiga pilar *good governance*, yaitu keterlibatan masyarakat, diiringi dengan meningkatnya alokasi dana perimbangan serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembayaran pajak, diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintahan. Dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah akan lebih efektif jika didukung oleh partisipasi masyarakat yang aktif. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pengawasan dan penganggaran, penggunaan dana perimbangan menjadi lebih transparan serta akuntabel. Hal berikut bisa mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran serta meyakinkan jika dana tersebut dipakai pada program yang memberi kegunaan maksimal untuk masyarakat.

Hasil penelitian (Dewi & Dicriyani, 2018) menunjukkan peran serta masyarakat mendukung dampak dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan terdapat keikutsertaan masyarakat, kaitan pada dana perimbangan serta kinerja keuangan pemerintah daerah tingkat kabupaten maupun kota menjadi lebih solid. Partisipasi masyarakat memotivasi pemerintah daerah untuk peningkatan penghasilan daerah yang kemudian bisa mendukung pemanfaatan dana perimbangan guna peningkatan kinerja keuangan daerah. Berdasarkan diskusi diatas,

hubungan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan yang dimoderasi partisipasi masyarakat dapat diformulasikan dalam hipotesis:

H₆: Partisipasi Masyarakat Memperkuat Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kuantitatif yaitu observasi ilmiah yang sistematis terhadap fenomena dan hubungan kausalitasnya. Ini melibatkan pengumpulan data yang bisa dihitung menggunakan metode statistik, matematika, maupun komputasi, dan sebagian besar dilakukan dengan metode statistik (Abdullah et al., 2022). Observasi berikut yaitu studi kuantitatif yang mempergunakan data sekunder selaku sumber informasi. Analisis dilakukan terhadap populasi sampel menggunakan perhitungan statistik dan alat uji. Data sekunder diambil dari dokumentasi serta sumber-sumber yang telah tersedia. Dalam studi berikut, data berasal pada laporan keuangan pemerintah Provinsi di Indonesia, yang diakses dengan mengakses laman resmi “Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)” Kementerian Keuangan di <https://djpk.kemenkeu.go.id>. Kemudian, studi ini juga diperkuat oleh banyak artiikel, jurnal, serta buku yang tersedia secara daring (Ardelia et al., 2022).

3.2 Lokasi Penelitian

Observasi berikut dilaksanakan dalam situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang mempublikasikan Laporan Realisasi APBD dari tahun 2019 hingga 2023, yang dapat diakses oleh umum. Observasi berikut mempunyai tujuan dalam menyelidiki Dampak Penghasilan Asli Daerah, Belanja Modal, serta Dana Perimbangan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia dalam keikutsertaan Masyarakat selaku Variabel Moderasi.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi Penelitian

Populasi adalah totalitas pada unit analisa yang memiliki ciri-ciri dan sifat spesifik yang ditentukan oleh peneliti untuk menjadi objek kajian serta ditarik kesimpulannya (Santoso & Madiistriyatno, 2021). Pada

observasi berikut, fokus populasinya adalah wilayah provinsi di Indonesia yang menyajikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2019 sampai 2023.

3.3.2. Sampel Penelitian

Sampel yaitu sebagian dalam total serta karakteristik yang terdapat dalam populasi. Jika populasi terlalu besar dan penulis tidak bias dipahami seluruhnya dikarenakan keterbatasan sumber daya, termasuk dana, tenaga, serta waktu, penulis bisa memilih sampel yang representatif untuk menggambarkan populasi secara keseluruhan (Abdullah et al., 2022). Sampel pada observasi berikut didapat pada populasi yang terpilih berlandaskan kriteria tertentu. Dari 38 data yang dikumpulkan selama periode lima tahun, diperoleh hasil 155 data *sampling*.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Purposive Sampling yaitu teknik pemilihan sampel pada pertimbangan tertentu (Abdullah et al., 2022). Penentuan sampel pada observasi berikut dilakukan dengan metode *purposive sampling*, di mana sampel terpilih berlandaskan kriteria tertentu dibawah ini:

1. Wilayah Provinsi di Indonesia yang menyajikan Data Laporan Realisasi APBD di Situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk)
2. Menerbitkan data Laporan Realisasi APBD yang tersedia secara publik tahun 2019 – 2023
3. Menyajikan data lengkap dan akurat untuk keperluan observasi terkait Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan sesuai dalam metode *Value for Money*.
4. Menyajikan data yang tidak terindikasi anomali atau sesuai dengan Pemerintah Daerah

Berdasarkan kriteria tersebut, didapatkan hasil sampel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Distribusi Sampel

No.	Kriteria	Jumlah	Data
1.	“Wilayah Provinsi di Indonesia yang menyajikan Data Laporan Realisasi APBD di Situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)”	38	190
2.	“Dikurangi data Laporan Realisasi APBD yang tidak diterbitkan secara publik tahun 2019 – 2023”	(5)	(25)
3.	“Dikurangi data lengkap dan akurat untuk keperluan penelitian mengenai Penhasilan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan sesuai pada metode <i>Value for Money</i> ”	(0).	(0)
4.	“Dikurangi Data yang Terindikasi Anomali atau sesuai dengan Pemerintah Daerah”	(2)	(10)
Total		31	155

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Setelah dilakukan purposive sampling dalam kriteria yang ditetapkan, didapat sampel penelitian berjumlah 31 dari 38 provinsi yang tersedia di situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan di <https://djpk.kemenkeu.go.id> untuk periode 2019 – 2023, menghasilkan total 155 data.

3.5 Data dan Jenis Data

Observasi berikut menggunakan data sekunder, terutama data kuantitatif pada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data laporan tahunan dapat diakses melalui situs resmi Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2019 - 2023.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dokumentasi yaitu sumber data yang dipakai dalam menyempurnakan observasi, baik berbentuk sumber tertulis, film, gambar (foto), serta karya-karya monumental, yang seluruhnya itu pemberian berita untuk tahapan observasi (Nilamsari, 2014). Observasi berikut mempunyai tujuan dalam mengumpulkan berita terkait Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, serta Dana Perimbangan melewati web resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan di <https://djpk.kemenkeu.go.id> untuk masa 2019 – 2023. Data diperoleh dengan mencatat informasi yang diperlukan untuk penelitian.

3.7 Definisi Operasional Variabel

3.7.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yaitu variabel yang diberi pengaruh atau muncul sebagai konsekuensi dari keberadaan variabel bebas, sehingga variabel tersebut bergantung pada variabel independen (Dekanawati et al., 2023). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah variabel terikat pada observasi berikut.

3.7.2 Variabel Independen

Variabel Independen / variabel bebas yakni faktor-faktor yang memberi pengaruh variabel dependen. Variabel bebas yang diterapkan pada studi berikut terdapat Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Modal (X2), serta Dana Perimbangan (X3).

3.7.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi yaitu faktor yang dapat meningkatkan maupun mengurangi efek suatu kaitan pada variabel independen serta dependen (Umamah, 2019). Variabel moderasi yang dipakai pada observasi berikut yakni Partisipasi Masyarakat.

Untuk mempermudah pemahaman, observasi berikut mengklasifikasikan variabel-variabel yang dipakai ke pada tiga kategori utama. Penelitian ini memakai tiga variabel independen (X), satu variabel dependen (Y), dan satu variabel moderasi (Z). Definisi

operasional dari variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
Variabel Independen (X)				
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)	Jumlah realisasi penghasilan yang berasal pada kawasan itu sendiri.	“PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah”	(Mulyani & Wibowo, 2017)
2.	Belanja Modal (BM) (X2)	Realisasi penerimaan Belanja Modal Pemerintah daerah Provinsi di Indonesia	“Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung serta Bangunan + Belanja Jala, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Lainnya”	(Yunita & Rasmini, 2018)
3.	Dana Perimbangan (DP) (X3)	Total semua realisasi pada pemerintah pusat.	“Dana Perimbangan = DBH + DAU + DAK DBH = Dana Bagi Hasil	(Nauw & Riharjo Ikhsan Budi, 2021)

No	Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
			DAU = Dana Alokasi Umum DAK = Dana Alokasi Khusus”	
Variabel Dependen (Y)				
1.	Kinerja Keuangan (KK)	Perbandingan kajian efektivitas dalam realisasi anggaran penghasilan serta belanja dilaksanakan dalam perbandingan realisasi penghasilan dalam tujuan realisasi anggaran penghasilan dikali pada 100%.	“Rasio Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$ ”	(Lona et al., 2023)
Variabel Moderasi (Z)				
1.	Partisipasi Masyarakat (PM)	Partisipasi masyarakat yaitu peran masyarakat untuk ikut serta pembayaran penyelenggaraan negara yang diwujudkan dengan melakukan pembayaran pajak.	“ $PM = \frac{PD_{t1} - PD_{t0}}{PD_{t0}}$ PM = Partisipasi Masyarakat PD _{t1} = Pendapatan daerah tahun saat ini	(Yunita & Rasmini, 2018)

No	Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
			PD _{t0} = Pendapatan daerah tahun sebelumnya”	

3.8 Analisis Data

Teknik kajian data yang digunakan dalam observasi berikut yakni kajian statistik dengan pengolahan data menggunakan bantuan perangkat lunak statistik, yaitu *Eviews13*. Adapun beberapa pendekatan analisis data yang diterapkan, seperti analisis regresi untuk mengidentifikasi kaitan pada variabel-variabel penelitian, pengujian statistik dalam mengukur signifikansi hasil observasi, dan kajian deskriptif dalam pemberian gambaran umum mengenai data. Adapun beberapa pendekatan analisis data diterapkan, seperti:

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu jenis kajian statistik yang bermanfaat dalam menjelaskan sifat-sifat sampel maupun populasi. Umumnya jenis kajian berikut diaplikasikan saat data pada sampel maupun populasi ada secara rinci (Winarno, 2013). Analisis statistik deskriptif adalah metode dalam mendeskripsikan, meringkas, dan melakukan analisis data dengan format yang dapat dimengerti dengan mudah. Ini melibatkan penghitungan ukuran statistik yaitu mean (rata-rata), median, mode, standar deviasi, serta lain-lain dalam pemberian gambaran umum tentang karakteristik data yang dikumpulkan.

3.8.2 Analisis Pemilihan Model

Regresi data panel memungkinkan intersep dan slope bervariasi antara perusahaan dan periode waktu. (Widarjono, 2007) menyatakan bahwa terdapat tiga metode untuk mengestimasi parameter model data panel, ialah:

1. “*Common Effect Model* (CEM). Metode berikut yaitu paling sederhana untuk estimasi parameter model data panel, dengan menyatukan data cross section serta time series selaku satu kesatuan, tanpa melihat

ketidaksamaan waktu serta individu. Metode yang digunakan pada model ini adalah *Ordinary Least Square (OLS)*”.

2. “*Fixed Effect Model (FEM)*. Metode berikut mengestimasi data panel memakai variabel dummy dalam mengetahui ketidaksamaan intersep. Teknik berikut mengandalkan terdapat perbedaan intersep antar industri, namun intersepnnya konsisten sepanjang waktu. Model berikut juga mengartikan jika koefisien regresi (*slope*) tetap konstan antar industri serta waktu. Pendekatan yang dipakai yaitu metode *Least Square Dummy Variable (LSDV)*”.
3. “*Random Effect Model (REM)*. Metode berikut mengestimasi data panel di mana variabel permasalahan memiliki hubungan pada waktu serta pada individu. Perbedaan pada individu serta waktu digolongkan melewati error. Dikarenakan adanya korelasi pada variabel gangguan, teknik OLS tidak bisa dipakai, sehingga model random effect dengan teknik *Generalized Least Square (GLS)*”.

Ada tiga uji yang digunakan dalam pemilihan metode estimasi data panel, yakni “pengujian Chow (pengujian statistik F), pengujian Hausman, serta pengujian Lagrange Multiplier”.

1. Pengujian chow, ialah uji dalam penentuan FEM maupun CEM yang paling sesuai dipakai untuk estimasi data panel. Mengambil keputusan dilaksanakan apabila, Skor prob. $F < 0,05$ sehingga model yang dipakai FEM. Namun apabila skor prob. $F > 0,05$ sehingga model yang dipakai CEM.
2. Pengujian Hausman, yakni uji statistik yang dipakai untuk penentuan apakah model FEM maupun REM lebih tepat dipakai. Keputusan diambil berdasarkan, Skor probabilitas chi squares $< 0,05$ sehingga model yang dipakai yakni FEM. Namun jika skor probabilitas chi squares $> 0,05$ sehingga model yang dipakai yakni REM.
3. Pengujian Lagrange Multiplier (LM), yaitu metode guna penentuan apakah model REM lebih sejalan daripada dengan CEM. Keputusan diambil berdasarkan, apabila Skor p value $< 0,05$ sehingga model yang

dipakai yakni REM. Sebaliknya, jika p value > 0,05 sehingga model yang dipakai yakni CEM.

3.8.3 Analisis Regresi Data Panel

Analisis data panel yaitu kombinasi data runtun waktu (*time series data*) serta data silang (*cross section data*) yang mencakup dimensi waktu dan ruang (Sarwono, 2016). Data panel juga dikenal sebagai *pooled data* (penggabungan *time series* serta *cross section*), *micropanel data*, *longitudinal data*, *event history analysis*, serta *cohort analysis* (Gujarati & Porter, 2012). Beberapa keunggulan penggunaan data panel antara lain total penelitian yang lebih besar, estimasi parameter yang lebih tepat, penyediaan data yang lebih informatif, pengurangan kolinearitas antar variabel, serta peningkatan derajat kebebasan atau efisiensi (Firdaus, 2020). Pada observasi berikut, kajian data panel diterapkan dalam penilaian variabel dependen yakni Kinerja Keuangan, bersama pada variabel independen lainnya.

Berikut adalah model persamaan regresi data panel :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Y = Kinerja Keuangan

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Belanja Modal (BM)

X3 = Dana Perimbangan (DP)

e = error, variabel pengganggu

i = Provinsi di Indonesia

t = Periode/waktu

3.8.4 Uji Asumsi Klasik

3.8.4.1 Uji Normalitas

Normalitas data diuji dalam mengetahui apakah distribusi data mengikuti pola normal. Ketika residual model tidak berdistribusi normal, Pengujian t menjadi kurang sesuai untuk pengujian koefisien regresi. Metode yang dapat dipakai untuk menguji normalitas mencakup histogram

residual, Kolmogorov-Smirnov, skewness kurtosis, dan Jarque-Bera. Namun, penggunaan histogram atau uji informal lainnya kurang dianjurkan karena interpretasi yang cenderung subjektif. Dalam perangkat lunak EViews, pengujian Jarque-Bera lebih praktis untuk mengidentifikasi apakah residual berdistribusi normal. Uji ini bekerja dengan asumsi asimtotik dari sampel besar dan melibatkan perhitungan skewness serta kurtosis. Menurut (Widarjono, 2007), keputusan pengujian Jarque-Bera dilaksanakan saat:

- a. “Skor probabilitas jarque-bera $>$ taraf signifikansi (0,05), sehingga residual mempunyai distribusi normal”.
- b. “Skor probabilitas jarque-bera $<$ taraf signifikansi (0,05), sehingga residual tidak mempunyai distribusi normal”.

3.8.4.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas diuji ketika model regresi melibatkan lebih dari satu variabel independen. Akibat terdapat multikolinearitas, banyak variabel independen mungkin tidak signifikan dalam memberi pengaruh variabel dependen, meskipun koefisien determinasi tetap tinggi. Cara dalam memperkirakan multikolinearitas termasuk *Variance Inflation Factor* (VIF) serta korelasi berpasangan. Metode korelasi berpasangan lebih bermanfaat dikarenakan penulis dalam memahami dengan jelas variabel independen mana yang mempunyai korelasi kuat (Sakti, 2018). Berlandaskan (Widarjono, 2007) mengambil keputusan teknik korelasi berpasangan dilaksanakan saat:

- a. “Skor korelasi pada setiap variabel bebas $<$ 0,85 sehingga tidak terdapat masalah multikolinieritas”.
- b. “Skor korelasi pada setiap variabel bebas $>$ 0,85 sehingga terdapat masalah multikolinieritas”.

3.8.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian berikut memiliki tujuan dalam mengkaji apakah variansi dalam error mempunyai sifat tetap/konstan (homoskedastik) maupun berbeda (heteroskedastik). Jika terdapat heteroskedastisitas, sehingga estimator OLS tidak memiliki sifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) (Rosadi, 2012). Jika cross-section test dan period test menghasilkan

“*residuals are homoskedastic*” berarti variansi dari error bersifat tetap/konstan (homoskedastik) (Nani, 2022).

3.8.4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan dalam identifikasi keberadaan maupun ketiadaan deviasi korelasi pada residual dari satu observasi dengan observasi lainnya dalam model regresi. Pengujian autokorelasi umumnya dalam data time series (data kurun waktu) sampai data ordinal maupun interval tidak harus dengan pengujian autokorelasi. Metode untuk mendeteksi autokorelasi meliputi analisis “grafik, Durbin-Watson, run, serta Lagrange Multiplier”. Penggunaan grafik atau pengujian informal lainnya kurang disarankan disebabkan interpretasinya bisa subjektif tanpa bilangan statistik. Teknik Lagrange Multiplier bisa digunakan sebagai alternatif deteksi autokorelasi dalam EViews. Keputusan metode Lagrange Multiplier dilaksanakan apabila:

- a. “Skor probabilitas chi squares $>$ taraf signifikansi (0,05), sehingga tidak terjadi autokorelasi”.
- b. “Skor probabilitas chi squares $<$ taraf signifikansi (0,05), sehingga terjadi autokorelasi”.

3.8.5 Pengujian Hipotesis

3.8.5.1 Uji R^2 atau Koefisien Determinasi

Koefisien R^2 mengukur tingkat kesesuaian model regresi, dalam skor dalam 0 sampai 1. Bertambah tinggi skor R^2 , bertambah baik model tersebut terhadap menjelaskan varians variabel dependen. Apabila nilai R^2 rendah, maka faktor independen tidak cukup menjelaskan varians pada variabel dependen. Dalam pengujian R^2 , skor yang lebih besar menunjukkan kualitas model yang lebih baik, karena perbedaan pada variabel dependen dapat dikaitkan dengan variabel independen. Dengan demikian, model yang memiliki R^2 tinggi diasumsikan lebih presisi. Koefisien determinasi menunjukkan tingkat informasi yang disediakan oleh variabel independen terkait perbedaan pada variabel dependen. *Adjusted R Square* dipakai untuk analisis dengan lebih dari 2 variabel independen,

sedangkan R Square digunakan untuk mengukur proporsi variabel yang diuji jika melibatkan satu atau dua variabel independen (Ghozali, 2018).

3.8.5.2 Uji Statistik T (Parsial)

Pengujian ini bertujuan dalam mengevaluasi apakah faktor independen mempunyai dampak dalam faktor dependen. Berikut ditemukan setelah penelitian menunjukkan nilai signifikansi lebih tinggi dari 0,05 sehingga hipotesis ditolak serta koefisien regresi dianggap tidak signifikan. Namun, koefisien regresi yang signifikan menunjukkan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Jika nilai signifikansi koefisien korelasi kurang dari 0,05 dampak tersebut diasumsikan signifikan serta hipotesis diterima (Ardelia et al., 2022; Ghozali, 2018).

3.8.6 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Pengujian ini mempunyai tujuan dalam memahami bagaimana variabel moderasi dapat didukung maupun melemahkan dampak variabel independen pada variabel dependen. Model persamaan uji moderasi pada observasi berikut dapat dirumuskan dibawah ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 X_1 Z + \beta_6 X_2 Z + \beta_7 X_3 Z + e$$

Keterangan:

Y	= Kinerja Keuangan
X ₁	= Penghasilan Asli Daerah
X ₂	= Belanja Modal
X ₃	= Dana Perimbangan
Z	= Partisipasi Masyarakat
α	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_7$	= Koefisien Regresi
e	= Level Kesalahan (error)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Studi berikut menjadikan pemerintah daerah provinsi selaku fokus utama, di mana pemerintah provinsi berfungsi sebagai lapisan administratif yang terdapat langsung di bawah kendali pemerintah pusat. Populasi penelitian melibatkan 38 wilayah provinsi di Indonesia yang dijadikan sumber data penelitian berasal dari tahun 2019 hingga 2023. Metode mengambil sampel memakai metode *purposive sampling*, yakni mengambil data dalam ketetapan tertentu yang perlu terpenuhi oleh sampel yang dipilih. Dari teknik ini, terdapat 31 provinsi yang terpenuhi syarat sebagai sampel, maka total data yang dikaji yaitu 155. Di bawah ini tercantum daftar provinsi yang menjadi fokus studi.

Tabel 4.1

Data Objek Penelitian

NO	NAMA PROVINSI
1	Nanggroe Aceh Darussalam
2	Sumatera Utara
3	Sumatera Selatan
4	Sumatera Barat
5	Bengkulu
6	Riau
7	Kepulauan Riau
8	Jambi
9	Lampung
10	Bangka Belitung
11	Kalimantan Barat
12	Kalimantan Timur
13	Kalimantan Selatan
14	Kalimantan Tengah
15	Banten
16	Jawa Barat

17	Jawa Tengah
18	Daerah istimewa Yogyakarta
19	Jawa Timur
20	Bali
21	Nusa Tenggara Timur
22	Nusa Tenggara Barat
23	Gorontalo
24	Sulawesi Barat
25	Sulawesi Tengah
26	Sulawesi Utara
27	Sulawesi Tenggara
28	Sulawesi Selatan
29	Maluku Utara
30	Papua Barat
31	Papua

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Penelitian ini menggunakan populasi yang memenuhi persyaratan yang diperlukan. Penentuan kinerja keuangan pemerintah daerah dilaksanakan memakai perbandingan efektivitas. Berlandaskan data yang didapat pada laporan realisasi anggaran serta penghasilan belanja daerah, sampel yang telah dipilih akan diuji dalam memahami dampak penghasilan asli daerah, belanja modal, serta dana perimbangan pada kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia dalam keikutsertaan masyarakat selaku variabel moderasi.

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu pengujian yang dipakai ketika mengidentifikasi “skor terkecil skor terbesar, skor rata-rata, serta standar deviasi” pada setiap variabel yang dipakai dalam model observasi. Pada observasi berikut, variabel kinerja keuangan disajikan ulang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), Dana Perimbangan (DP), serta Partisipasi Masyarakat (PM). Dibawah berikut yaitu hasil output pada analisis statistik deskriptif.

Gambar 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
KK	155	0,75	1,55	1,01	0,11
PAD	155	0,02	0,36	0,19	0,08
BM	155	0,02	0,15	0,08	0,03
DP	155	0,10	0,45	0,26	0,08
PM	155	-0,66	0,64	0,01	0,12

Sumber: Diolah Oleh EViews 13, 2025

Berlandaskan data yang disajikan dalam gambar 4.1, informasi mengenai variabel penelitian telah dikumpulkan, yaitu:

1. Pada variabel Kinerja keuangan memiliki nilai maksimum sebesar 1,55 merupakan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Nilai minimum sebesar 0,75 yakni Provinsi Papua Barat pada tahun 2023. Skor rata-rata sebanyak 1,01. Serta terdapat skor standar deviasi sebanyak 0,11.
2. Pendapatan Asli Daerah mempunyai skor tertinggi sebanyak 0,36 atas Provinsi Banten tahun 2023, nilai terendah sebanyak 0,02 merupakan nilai atas Provinsi Papua tahun 2019, skor rata-rata (*mean*) sebanyak 0,19 serta skor standar deviasi sebanyak 0,08 dalam jumlah semua data observasi yakni 155 data.
3. Belanja Modal memiliki skor maksimum sebanyak 0,15 yang merupakan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022, minimum sebesar 0,02 yakni Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, (*mean*) sebesar 0,08 beserta nilai std. dev sebesar 0,03.
4. Dana Perimbangan memiliki nilai maksimum sebesar 0,45 yakni pada Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023, sedangkan nilai minimum 0,10 merupakan nilai dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam tahun 2022, skor rata-rata (*mean*) berjumlahkan 0,26 serta skor standar deviasi berjumlahkan 0,08.

5. Nilai tertinggi dari variabel Partisipasi Masyarakat adalah 0,64 untuk Povinsi Papua pada tahun 2023, nilai terendah sebesar -0,66 untuk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020, dan skor rata-rata (*mean*) sebanyak 0,01 dengan standar deviasi sebanyak 0,12.

4.1.3 Analisis Pemilihan Model

Studi berikut dengan kajian regresi data panel. Apabila regresi data panel dipakai selaku metode kajian dalam suatu observasi, maka pemilihan model regresi menjadi sangat penting. 3 model utama yang dipakai pada regresi data panel yaitu “*Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), serta *Random Effect Model* (REM)”. Pada ketiga model tersebut, akan terpilih satu model terbaik yang sesuai untuk observasi berikut. Untuk penentuan model terbaik yang akan dipakai, dibutuhkan uji penentuan model yang mencakup pengujian Chow, pengujian Hausman, serta pengujian Langrange Multiplier.

4.1.3.1 Uji Chow

Pengujian Chow dipakai penentuan model yang paling selaras dalam “*common effect model* dan *fixed effect model*”. Keputusan diambil agar mengetahui skor probabilitas dalam cross section F. Apabila skor prob. $F > 0,05$ sehingga *Common Effect Model* yang akan terpilih. Tetapi, jika Nilai prob. $F < 0,05$ maka *Fixed Effect Model* terpilih.

Gambar 4.2 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2,85	(30,12)	0,00
Cross-section Chi-square	82,79	30	0,00

Sumber: Hasil EViews 13, 2025

Merujuk pada temuan dari pengujian chow yang terdapat pada gambar 4.2 di atas, skor cross-section F serta cross-section Chi-square menyatakan skor yang \leq skor alpha 0,05. Dengan kata lain, $p = 0,00 < 0,05$, yang bermakna model terbaik yang terpilih dari uji Chow ialah *Fixed Effect Model*. Berdasarkan hasil ini, pengujian model akan dilanjutkan dengan pengujian Hausman.

4.1.3.2 Uji Hausman

Pengujian Hausman diterapkan dalam memilih model yang paling sesuai pada “*Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*”. Pemilihan dilaksanakan berdasarkan skor probabilitas pada *cross-section random*. jika skor $p \leq 0,05$, sehingga *Fixed Effect Model* menjadi pilihan. Sebaliknya, apabila skor $p \geq 0,05$, maka *Random Effect Model* yang terpilih.

Gambar 4.3 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	22,47	3	0,00

Sumber: Hasil EViews 13, 2025

Dari gambar 4.3 tersebut, terlihat jika skor cross-section random lebih kecil pada skor alpha 0,05 yakni $0,00 < 0,05$. Maka, model yang terpilih berlandaskan pengujian Hausman berikut yaitu *Fixed Effect Model*. Dengan demikian, hasil pada pengujian Chow serta pengujian Hausman menyatakan jika model terbaik yang akan dipakai dalam observasi berikut yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

4.1.4 Analisis Regresi Data Panel

Pendekatan dalam observasi berikut memakai regresi data panel, yang menyatukan data *cross-section* serta *time series* untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel dengan lebih mendalam. Observasi berikut memanfaatkan data *time series* dalam lima tahun, mulai 2019 hingga 2023, untuk melakukan analisis. Selain itu, observasi berikut dengan data *cross-section* pada 31 Provinsi di Indonesia yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah.

Hasil kajian penentuan model regresi menunjukkan jika pendekatan terbaik yang digunakan yakni *Fixed Effect Model*. *Fixed Effect Model* ini merupakan bagian dari kerangka kerja *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Setelah menentukan model terbaik yang dipakai pada observasi berikut, langkah berikutnya yakni melakukan kajian regresi data panel. Observasi berikut memakai tiga variabel independen, yakni Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Modal (X2), serta Dana Perimbangan (X3). Sementara itu, variabel dependen yang digunakan adalah Kinerja

Keuangan (Y) yang diukur melalui Pengukuran Efektivitas. Hasil analisis regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* bias diketahui dalam gambar dibawah:

Gambar 4.4

Hasil Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,55	0,10	5,42	0,00
PAD	1,59	0,27	5,82	0,00
BM	1,32	0,38	3,43	0,00
DP	0,13	0,21	0,60	0,55

Sumber: Hasil EViews 13, 2025

4.1.5 Uji Asumsi Klasik

4.1.5.1 Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas guna memahami distribusi data variabel penelitian. Berikut adalah hasil dari uji normalitas:

Gambar 4.5

Hasil Uji Normalitas

Series: Standardized Residuals	
Sample 2019 2023	
Observations 155	
Mean	2.15e-18
Median	0.001002
Maximum	0.201416
Minimum	-0.186954
Std. Dev.	0.058360
Skewness	0.011904
Kurtosis	3.817575
Jarque-Bera	4.320598
Probability	0.115291

Berlandaskan gambar 4.5 di atas, hasil pengujian normalitas data menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,115291 yang menunjukkan jika data ini berdistribusi dengan normal.

4.1.5.2 Uji Multikolinearitas

Penelitian berikut melaksanakan uji kemungkinan adanya multikolinearitas antara variabel-variabel independen. Multikolinearitas dapat menjadi masalah dalam analisis regresi karena dapat menyebabkan

ketidakstabilan dan ketidakakuratan pada koefisien regresi. Yaitu dibawah adalah hasil pengujian multikolinearitas:

Gambar 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas				
	KK	PAD	BM	DP
KK	1,00	0,09	0,08	-0,14
PAD	0,09	1,00	-0,45	-0,46
BM	0,08	-0,45	1,00	0,40
DP	-0,14	-0,46	0,40	1,00

Hasil output korelasi dalam pengujian multikolinearitas menyatakan jika skor korelasi untuk semua variabel independen kecil dari 0,85. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada tanda-tanda multikolinearitas dalam variabel independen.

4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi ketika varians dari residual berubah-ubah dan bergantung pada nilai variabel independen, bukannya konstan.

Gambar 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

```
Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test
Equation: UNTITLED
Specification: Y C X1 X2 X3
Null hypothesis: Residuals are homoskedastic
```

```
Panel Period Heteroskedasticity LR Test
Equation: UNTITLED
Specification: Y C X1 X2 X3
Null hypothesis: Residuals are homoskedastic
```

Pada cross-section test dan period test diatas yaitu menghasilkan “*residuals are homoskedastic*” yang artinya variansi dari error bersifat tetap/konstan (homoskedastik).

4.1.6 Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis, akan dilaksanakan kajian koefisien determinasi dan pengujian dampak parsial (uji T).

4.1.6.1 Analisis Koefisien Determinasi

Mengacu pada tabel 4.6, tingkat koefisien determinasi (R-squared) dalam penelitian ini adalah $R^2=0,678779$ (0,68) atau 68%. Ini berarti jika Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, serta Dana Perimbangan dengan bersama-sama atau simultan mempengaruhi Kinerja Keuangan sebesar 68%.

Gambar 4.8

Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.678779
Adjusted R-squared	0.577197

Sumber: Hasil EViews 13, 2025

4.1.6.2 Uji Pengaruh Parsial (Uji T)

Merujuk dalam tabel 4.5 tersebut, persamaan model regresi bisa dirumuskan dibawah ini:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Y = Kinerja Keuangan

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X1 = Pendapatan Asli Dearah (PAD)

X2 = Belanja Modal (BM)

X3 = Dana Perimbangan (DP)

e = error, variabel pengganggu

i = Data sampel

t = Periode/waktu

Dalam persamaan regresi sudah telah dirumuskan, ehingga model regresi tersebut menjadi:

$$Y = 0,55 + 1,59 * X1 + 1,32 * X2 + 0,13 * X3 + e$$

Berdasarkan table 4.5, diketahui :

1. “Dengan koefisien regresi sebanyak 1,59 serta level probabilitas (prob) $0,00 < 0,05$ observasi berikut menyatakan jika penghasilan asli daerah mempunyai dampak positif pada kinerja keuangan”.

2. “Hasil observasi menunjukkan jika Belanja Modal berdampak dalam kinerja keuangan. Hal berikut diketahui oleh skor koefisien regresi sebanyak 1,32 serta tingkat probabilitas (prob) $0,00 < 0,05$ ”.
3. “Temuan menyatakan jika Dana Perimbangan tidak berdampak pada kinerja keuangan. Seperti yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas (prob) $0,55 > 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 0,13”.

4.1.7 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Langkah berikutnya adalah melakukan pengujian moderasi untuk mengukur apakah struktur model memoderasi kaitan pada penghasilan asli daerah, belanja modal, serta dana perimbangan dalam kinerja keuangan. Hasil pengujian moderasi bias diketahui dalam tabel 4.7.

Gambar 4.9

Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,55	0,10	5,42	0,00
PAD	1,59	0,27	5,82	0,00
BM	1,32	0,38	3,43	0,00
DP	0,13	0,21	0,60	0,55
PM	-0,70	0,22	-3,26	0,00
PAD*PM	1,20	0,52	2,28	0,02
BM*PM	-6,50	3,26	-1,99	0,04
DP*PM	5,24	0,90	5,83	0,00

Merujuk pada tabel 4.9, didapat persamaan moderasi dibawah ini:

$$Y = 0,55 + 1,59*X_1 + 1,32*X_2 + 0,13*X_3 - 0,70*Z + 1,20*X_1Z - 6,50*X_2Z + 5,24*X_3Z + e$$

Berdasarkan gambar 4.9, diketahui bahwa :

1. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bisa memoderasi kaitan pada penghasilan asli daerah serta kinerja keuangan. Hal berikut dibuktikan oleh nilai koefisien regresi sebesar 1,20 dan level probabilitas (prob) sebanyak 0,02 yang $\leq 0,05$ ”.
2. “Temuan penelitian memperlihatkan partisipasi masyarakat bisa memoderasi belanja modal dalam kinerja keuangan. Ditunjukkan melalui angka koefisien regresi sebesar -6,50 beserta skor probabilitas (prob) 0,04 yang $\leq 0,05$ ”.

3. “Temuan menunjukkan partisipasi masyarakat tidak bisa memoderasi dana perimbangan dalam kinerja keuangan. Dibuktikan oleh koefisien regresi sebesar 5,24 beserta taraf probabilitas (prob) sebanyak $0,00 < 0,05$ ”.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil regresi, dengan koefisien sebanyak 1,59 serta level probabilitas (prob) $0,00 < 0,05$ diketahui apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif dalam kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Peningkatan PAD memberikan lebih banyak sumber daya bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan wilayahnya. Dana yang lebih besar memungkinkan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan, memperbaiki infrastruktur, dan menyediakan layanan publik yang lebih baik. Selain itu, peningkatan PAD juga menunjukkan kemandirian keuangan yang lebih tinggi, yang bisa meminimalisir ketergantungan pada transfer dana pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah berperan penting untuk ukuran kapasitas fiskal suatu daerah, yang pada gilirannya memperlihatkan kinerja keuangan daerah tersebut (Musgrave, R.A., & Musgrave, P.B. 1989). Dengan demikian, peningkatan PAD yang diiringi dengan pengelolaan yang baik dapat berkontribusi memiliki dampak yang berarti pada performa keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks Teori Keagenan (M. Jensen & Meckling, 1976), tingginya PAD menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah sebagai agen dalam mengelola aset untuk memenuhi harapan masyarakat sebagai prinsipal. Ketika PAD dikelola secara transparan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung, masyarakat memperoleh kepercayaan lebih terhadap pemerintah, sehingga mencegah kesenjangan pemahaman dan informasi antara masyarakat dan Pemerintah. Hasil observasi berikut selaras pada observasi yang dilaksanakan oleh (Ardelia et al., 2022) serta (Digdowiseiso et al., 2022),

ditemukan jika terdapat keterkaitan positif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.2.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil observasi menyatakan jika Belanja Modal memiliki pengaruh positif dalam kinerja keuangan, dalam koefisien sebanyak 1,32 serta level probabilitas (prob) $0,00 < 0,05$. Hal berikut memperkirakan jika peningkatan belanja modal untuk infrastruktur fisik dan aset jangka panjang berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Pengelolaan belanja modal yang terencana dengan baik bisa mendorong efektivitas alokasi anggaran, mendukung pembangunan ekonomi, serta peningkatan layanan publik. Pengelolaan yang baik terhadap belanja modal akan memberikan dampak nyata pada kualitas pembangunan daerah.

Hasil observasi berikut selaras pada observasi yang dilaksanakan oleh (Simamora & Budiwitjaksono, 2022) serta (Lathifa & Haryanto, 2019) mengungkapkan bahwa terdapat dampak positif belanja modal pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan teori keagenan, belanja modal yang transparan mencerminkan tanggung jawab pemerintah sebagai agen dalam memenuhi kepentingan masyarakat sebagai prinsipal. Dengan pengawasan yang efektif, risiko ketidaksesuaian informasi atau komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat diminimalkan, sehingga memastikan alokasi belanja modal tepat sasaran.

4.2.3 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan

Temuan studi menyatakan jika Dana Perimbangan tidak berdampak pada kinerja keuangan, dalam koefisien sebanyak 0,13 serta tingkat probabilitas (prob) $0,55 > 0,05$. Hasil berikut menyatakan jika meskipun dana perimbangan memberikan kontribusi penting bagi kebutuhan fiskal daerah, efektivitasnya terhadap peningkatan kinerja keuangan sangat diberi pengaruh oleh efisiensi pengelolaannya. Dalam beberapa kasus, ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan tanpa disertai inovasi pendapatan daerah menyebabkan dampak yang kurang signifikan dalam kinerja keuangan.

Menurut teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen harus mengelola dana perimbangan secara transparan untuk mengurangi risiko kurangnya informasi atau pemahaman yang adil antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan dana digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Temuan berikut tidak selaras pada studi sebelumnya, seperti yang dilaksanakan oleh (Ardelia et al., 2022; Thalib & Ekaningtias, 2019), yang menyimpulkan adanya hubungan negatif, maupun penelitian (Rustiyani & Irene Sukma Lestari Barus, 2023) yang mendapatkan terdapatnya dampak signifikan Dana Perimbangan pada kinerja keuangan.

4.2.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Memoderasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Berlandaskan observasi, keikutsertaan masyarakat dapat memoderasi kaitan pada PAD serta kinerja keuangan. Hal berikut diketahui oleh nilai koefisien regresi sebanyak 1,20 serta level probabilitas (prob) sebanyak 0,02 yang $\leq 0,05$. Hal ini menunjukkan jika keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan anggaran mampu memperkuat hubungan antara PAD dan kinerja keuangan. Partisipasi yang aktif menciptakan transparansi serta akuntabilitas dalam mengelola keuangan, sehingga pemerintah daerah bisa lebih optimal memanfaatkan PAD untuk pembangunan dan pelayanan publik. (Arnstein, 1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif harus melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Berdasarkan teori keagenan, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang mengurangi kurangnya keselarasan informasi atau komunikasi pada selaku agen serta masyarakat selaku prinsipal. Dengan keterlibatan masyarakat, akuntabilitas pemerintah meningkat, sehingga pengelolaan PAD lebih efektif dan selaras dengan kepentingan masyarakat. Temuan ini sama dengan penelitian (Yunita & Rasmini, 2018), yang juga menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dapat memperkuat dampak PAD pada kinerja keuangan pemerintah

daerah. Akan tetapi, hasil berikut berbanding terbalik pada observasi (Maulida'arifina, 2024), menyimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat dapat memoderasi dengan memperlemah hubungan tersebut.

4.2.5 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Memoderasi Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Temuan penelitian menunjukkan jika keikutsertaan masyarakat bisa memoderasi hubungan antara Belanja Modal dan kinerja keuangan, dalam koefisien sebanyak -6,50 serta jenjang probabilitas (prob) $0,04 < 0,05$. Nilai koefisien negatif tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, ketika tidak dilaksanakan secara efektif, justru dapat melemahkan hubungan positif antara belanja modal dan kinerja keuangan. Ketidakefektifan partisipasi masyarakat, seperti kurangnya keterlibatan nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan belanja modal, dapat mengarah pada inefisiensi atau pemborosan anggaran, sehingga tujuan belanja modal untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kinerja keuangan tidak tercapai secara maksimal.

Dalam konteks ini, mekanisme partisipasi yang lebih terarah, transparan, dan disertai edukasi kepada masyarakat dapat menjadi solusi untuk memastikan dampak positif yang diharapkan dari belanja modal pada kinerja keuangan. Pendapat berikut selaras pada (Putnam, 1993), yang menyebutkan jika keberhasilan partisipasi masyarakat bergantung pada kapasitas masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dan efektif dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan pemerintah. Dalam kaitannya dengan teori keagenan, partisipasi yang tidak efektif dapat menciptakan kurangnya kesepahaman pada pemerintah selaku agen serta masyarakat selaku prinsipal, sehingga menghambat tercapainya tujuan belanja modal. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai peran mereka dalam pengawasan untuk memperbaiki efektivitas belanja modal. Hasil observasi berikut tidak selaras pada observasi (Yunita & Rasmini, 2018) menyebutkan jika keikutsertaan masyarakat meningkatkan dampak belanja modal pada performa keuangan pemerintah daerah.

4.2.6 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Memoderasi Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil observasi melihatkan jika partisipasi masyarakat dapat memengaruhi tingkat hubungan antara Dana Perimbangan dengan performa keuangan, dalam koefisien regresi sebanyak 5,24 serta level probabilitas (prob) $0,00 < 0,05$. Hal berikut menyebutkan jika keterlibatan masyarakat pada proses pengelolaan dana perimbangan, seperti perencanaan, pengawasan, dan evaluasi, mampu memperkuat dampak positif dana perimbangan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Melalui partisipasi yang aktif serta efektif, pengelolaan dana perimbangan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terarah pada prioritas pembangunan, sehingga mendorong efisiensi penggunaan dana serta peningkatan kualitas layanan publik. Partisipasi masyarakat yang efektif dalam pengelolaan dana perimbangan memerlukan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Tanpa mekanisme tersebut, partisipasi masyarakat tidak akan berdampak signifikan terhadap pengelolaan dan hasil penggunaan dana perimbangan (Chambers, 1997).

Berdasarkan teori keagenan, partisipasi masyarakat menciptakan keseimbangan tanggung jawab antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Dengan keterlibatan masyarakat yang efektif, potensi komunikasi yang buruk atau pengelolaan dana yang tidak efisien dapat diminimalkan, sehingga hasil pengelolaan dana perimbangan lebih optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Hasil observasi berikut selaras dalam hasil observasi (Yunita & Rasmini, 2018), menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat meningkatkan efek dana perimbangan thp performa keuangan pemerintah daerah. Tetapi, hasil berikut tidak selaras pada temuan (Maulida'arifina, 2024), yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memoderasi hubungan tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berlandaskan studi terkait Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, serta Dana Perimbangan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, dalam Partisipasi Masyarakat selaku Variabel Moderasi, Beberapa poin utama dapat dirangkum dibawah ini:

1. Penghasilan Asli Daerah mempunyai dampak positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Meningkatnya PAD memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan, sehingga dapat lebih efektif dalam melaksanakan program pembangunan dan memberikan layanan publik. Hal ini tercermin dalam kemampuan pemerintah daerah guna pengurangan ketergantungan dalam biaya transfer pada pemerintah pusat.
2. Belanja Modal mempunyai dampak positif dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Penggunaan belanja modal yang efektif dan efisien tidak hanya meningkatkan kapasitas aset daerah, tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam pemberian layanan publik yang optimal. Hal berikut menunjukkan jika alokasi anggaran belanja modal yang tepat dapat menjadi bagian faktor utama dalam pendukung perkembangan ekonomi daerah dan keberlanjutan fiskal yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal menjadi strategi penting bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Dana Perimbangan tidak mempunyai dampak dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal berikut menunjukkan apabila meskipun dana perimbangan ialah salah satu contributor utama terhadap pendapatan pemerintah daerah, penggunaannya tidak secara langsung meningkatkan efektivitas atau efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Faktor-faktor lain seperti tata kelola,

kebijakan fiskal, dan kemampuan pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah dapat lebih berpengaruh terhadap kinerja keuangan tersebut. Maka, diperlukan evaluasi serta penguatan strategi mengelola keuangan daerah yang lebih komprehensif.

4. Partisipasi masyarakat bisa memoderasi hubungan pada PAD, belanja modal, serta dana perimbangan pada kinerja keuangan. Tingginya partisipasi masyarakat dapat memperkuat hubungan positif dari variabel-variabel tersebut, terutama melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, mengkaitkan masyarakat dengan aktif pada tahapan merencanakan serta pengawasan anggaran menjadi strategi yang penting untuk mendorong optimalisasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.2 Saran

Berlandaskan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa saran:

1. Dalam observasi mendatang, terdapat untuk penambahan variabel independen lain yang bisa berdampak pada performa keuangan pemerintah daerah. Disarankan pula untuk mengeksplorasi variabel moderasi lain yang memiliki potensi lebih lanjut untuk memperkuat hubungan antara variabel independen dan kinerja keuangan, untuk memperluas pemahaman yang mendalam terkait elemen-elemen yang memengaruhi performa keuangan pemerintah daerah.
2. Penelitian selanjutnya juga sebaiknya memperluas jumlah sampel serta rentang waktu pengamatan guna mendapatkan data yang lebih relevan dan kuat.
3. Peneliti berikutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penilaian kinerja keuangan dengan menerapkan rasio yang berbeda, seperti rasio kemandirian daerah, rasio ekonomi, dan rasio efisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K. N., Sari, M. E., Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Afirman, L., Aini, M., Purwanto, Adriyanto, Widiadi, A., Widyajala, B., Purbo, R. K., Sembiring, B. A., Hijrah, M., Ednur, R. K., Sugiyarto, A., Bestari, R. R., Saputra, A., Efriyazwar, Yusuf, A. I., Kurniawan, M. H., Pohan, M., N., D. C., & Karunianingtyas, K. P. (2023). *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah* (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (ed.)). https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/09/LPEFD_Edisi_XL___Agustus_2023_fin.pdf
- Andaresta, H., Aswar, K., & Ermawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Size Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Prosiding Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 1614–1624. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/korelasi/article/view/1227/882>
- Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. (2021). Analysis of Local Own Revenue and Balancing Funds on the Financial Performance of Districts and Cities in the Region of East Java Province. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 13(1), 235–250. <https://doi.org/10.34109/ijefs.202112233>
- Andriani, S. (2012). Pengukuran Kinerja dengan Prinsip Value For Money Pemerintah Kota Batu. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*.
- Apridiyanti, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 4(3), 32–41. <https://doi.org/10.29407/jae.v4i3.12822>

- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60–80. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *J. Am. Inst. Planners*, 35(4), 216–224.
- Arsallya, M. R., Azwardi, A., & Yusnaini, Y. (2021). Analysis of factors affecting capital expenditures and their implications on government financial performance provinces in Indonesia 2011-2019. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 10(5), 95–106. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1195>
- Aulia, R., & Rahmawaty, R. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584–598. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16826>
- Ayu, P. P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 3(1), 80. <https://doi.org/10.29407/jae.v3i1.12007>
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(02), 164–174. <https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.190>
- Bakhitah, Q., & Ryandono, M. N. H. (2020). Efisiensi Operasional Sebagai Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja BMT (Studi Kasus: BMT UGT Sidogiri Cabang Lumajang). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(6), 1287. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1287-1303>
- Chaerani, E. Y., & Firmansyah, A. (2024). Regional Revenues, Audit Opinions,

- Local Government Financial Performance: the Moderating Role of Capital Expenditure. *Riset*, 6(1), 090–103. <https://doi.org/10.37641/riset.v6i1.2064>
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. [http://faculty.washington.edu/jhannah/geog335aut07/readings/Chambers - WhoseReality Ch1&2.pdf](http://faculty.washington.edu/jhannah/geog335aut07/readings/Chambers-WhoseRealityCh1&2.pdf)
- Darwanis, D., & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 183–199. <https://doi.org/10.24815/jdab.v1i2.3628>
- Dekanawati, V., Astriawati, N., Setiyantara, Y., Subekti, J., & Kirana, A. F. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Diklat Kepabeanan Terhadap Kepuasan Peserta Pelatihan. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 23(2), 159. <https://doi.org/10.33556/jstm.v23i2.344>
- Dewata, E., Sari, Y., & Nuvanti, F. (2021). The Effect of Locally Generated Revenue as an Intervening Variable on the Financial Performance of the Regional Government of South Sumatra Province. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 7(4), 80–98. <https://doi.org/10.32602/jafas.2021.034>
- Dewi, N. L. P. S., & Dicriyani, N. L. G. M. (2018). *1, 2 1,2. 1(02)*, 143–152.
- Digdowniseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572–2580. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1150>
- Dwigantara, M. P., & Handayani, N. (2020). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(10), 1–22.

- Falah. (2024). *Refleksi Al Hasyr Ayat 7: Pentingnya Pemerataan Ekonomi*.
<https://mediaislam.id/refleksi-al-hasyr-ayat-7-pentingnya-pemerataan-ekonomi/>
- Firdaus, M. (2020). *Aplikasi Ekonometrika Dengan E-Views, Stata, dan R*. IPB Press.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
https://digilib.itbwigalumajang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2775
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.
- Hermawan, S., & Hariyanto, W. (2022). Buku Ajar Metode Penelitian Bisnis (Kuantitatif Dan Kualitatif). In *Buku Ajar Metode Penelitian Bisnis (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. <https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-047-2>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Also published in Foundations of Organizational Strategy. *Journal of Financial Economics*, 4, 305–360.
<http://ssrn.com/abstract=94043>Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=94043>
<http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Karina, L. A., & Ramadhani, W. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value for Money Pada Blud Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *Value*, 2(2), 71–82. <https://doi.org/10.36490/value.v2i2.214>
- Karlinda, A. E., Azizi, P., & Sopali, M. F. (2021). Pengaruh pengalaman kerja, prestasi kerja, pendidikan dan pelatihan terhadap pengembangan karir pada PT. PLN (persero) kota padang rayon kuranji. *Journal of Information System*,

Applied, Management, Accounting and Research., 5(2), 523–531.
<https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2>

Korompot, R., & Warongan, J. (2017). Analysis of Financial Performance in the Government of North Sulawesi. *Accountability*, 6(2), 9.
<https://doi.org/10.32400/ja.17755.6.2.2017.9-19>

Lathifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(2), 2337–3806. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional. (2023). *7 Cara Mudah Optimalisasi Dana Perimbangan Pada Pemerintah Daerah*. LPKN Training Center. <https://lpkn.org/2023/07/07/cara-optimalisasi-dana-perimbangan-pada-pemerintah-daerah/>

Lona, S. S., Perseveranda, M. E., & Manafe, H. A. (2023). Analisis Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja. *Owner*, 7(1), 879–889. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1486>

Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17–32.
<https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1106>

Mamuka, K. K., Rorong, I. P. F., & Sumual, J. I. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03), 118–128.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.

Maulida'arifina, M. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai*

Variabel Moderasi. <http://etheses.uingusdur.ac.id/9982/>

- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, Vol. 5 No.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015). *Kompartemen:Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1), 57–66.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public Finance in Theory and Prcatice. In *Economists' Voice* (Vol. 9, Issue 2). <https://doi.org/10.1515/1553-3832.1898>
- Nafiah, I., & Evita Dyah Wardhani. (2023). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2022-2023* (T. I. dan P. Direktorat Statistik Keuangan (ed.)). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/21/64368d768c8e41ce119aabda/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-2022-2023.html>
- Nahdia, E. P., & Sugiartono, E. (2023). Konsep Value for Money Pada Pengukuran Kinerja Keuangan Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 652–662.
- Nani. (2022). E-Book Data Panel Eviews.pdf. In *Visi Intelegensia: Vol. Vol. 1* (Issues 978-623-95606-6–9, p. 56). <https://repository.uinbanten.ac.id/11748/1/E-Book Data Panel Eviews.pdf>
- Nauw, E. T., & Riharjo Ikhsan Budi. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 10 No.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8(2), 177–1828. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>

- Nugraha, A. C. (2019). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Intergovernmental Revenue, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2017)*.
- Nugroho, F. (2012). Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Diponegoro*, 1(2), 1–80. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8707>
- Nuraafiyah, C. R., & Abdullah, S. (2021). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Pengukuran dan Manfaatnya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 1(1), 90. <https://doi.org/10.35308/jimetera.v1i1.4330>
- Nurkhayat, A., Firdaus, M., & MUlatsih, S. (2018). Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1), 35–47. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22705
- Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 25(1), 124–135. <https://doi.org/10.1177/0899764096251009>
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3620/3636>
- Putri, S. P., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jesya*, 6(2), 2068–

2082. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1230>

- Rika, H. (2019). *Realisasi Belanja Modal Pemerintah Turun 15 Persen*. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190717110641-532-412856/realisasi-belanja-modal-pemerintah-turun-15-persen?utm_source=chatgpt.com
- Riswan, & Anthony Affandi. (2014). *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori keagenan (Studi Pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera)*. 5(2), 1–23.
- Rosadi, D. (2012). *Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan Dengan Eviews*. ANDI.
- Rustiyan, N., & Irene Sukma Lestari Barus. (2023). *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat*.
- Sakti, I. (2018). *Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews*. https://www.academia.edu/37059747/ANALISIS_REGRESI_DATA_PANEL_MENGGUNAKAN_EVIEWS
- Santoso, I., & Madiistriyatno, H. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.
- Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. <https://doi.org/10.4324/9781003322603-5>
- Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *JOM Fekon*, 3(1), 679–692.
- Sarwono, J. (2016). *Prosedur-Prosedur Analisis Populer Aplikasi Riset Skripsi Dan Tesis Dengan Eviews*. Gava Media.

- Simamora, W. C., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 410. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.547>
- Thalib, F., & Ekaningias, D. (2019). The effect of original LG revenue, balancing fund, and capital expenditure on LG financial performance in regencies in East Java Province. *The Indonesian Accounting Review*, 9(1), 39–49. <https://doi.org/10.14414/tiar.v9i1.1704>
- Umamah, U. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan Dengan Metode Moderated Regression Analysis. *Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika Dan Terapannya*, 8(4), 979–989. <https://doi.org/10.26418/bbimst.v8i4.36772>
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/2364>
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.
- Winarno. (2013). Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani. *Sustainability (Switzerland)*. file:///H:/Document/SKRIPSI/JURNAL REFERENSI/buku-8.pdf
- Yuliatwati, S., Zuliyana, M., & Rani, S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Dearah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera. 6(1), 13–29.
- Yunita, P. V., & Rasmini, N. K. (2018). Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh PAD , Dana Perimbangan , dan Belanja Modal pada Kinerja

*Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Indonesia
Email : venny.ynt@gmail.com Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Udayana , Indonesia. 1049–1065.*

Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2024). The Effect of Financial Performance on Capital Expenditure, Economic Growth, Human Development Index, and Poverty. *Quality - Access to Success*, 25(200), 188–202. <https://doi.org/10.47750/QAS/25.200.20>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Output Eviews

1. Hasil Analisis Deskriptif

	KK	PAD	BM	DP	PM
Mean	1.006282	0.189606	0.075023	0.264144	0.014797
Median	0.994412	0.188139	0.072101	0.275670	0.024900
Maximum	1.547137	0.359026	0.150871	0.449488	0.644272
Minimum	0.751140	0.022405	0.019112	0.101823	-0.661809
Std. Dev.	0.114234	0.075462	0.028350	0.075494	0.123232
Skewness	1.542758	0.025965	0.416174	-0.142881	-0.136874
Kurtosis	7.639738	2.459147	2.718623	2.297775	14.77412
Jarque-Bera Probability	200.5156 0.000000	1.906620 0.385463	4.985672 0.082675	3.712121 0.156287	895.8025 0.000000
Sum	155.9737	29.38901	11.62850	40.94229	2.293509
Sum Sq. Dev.	2.009609	0.876957	0.123769	0.877690	2.338654
Observations	155	155	155	155	155

2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.847567	(30,121)	0.0000
Cross-section Chi-square	82.794234	30	0.0000

3. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	22.470646	3	0.0001

4. Uji Normalitas

Series: Standardized Residuals	
Sample 2019 2023	
Observations 155	
Mean	2.15e-18
Median	0.001002
Maximum	0.201416
Minimum	-0.186954
Std. Dev.	0.058360
Skewness	0.011904
Kurtosis	3.817575
Jarque-Bera	4.320598
Probability	0.115291

5. Uji Multikolinearitas

	Y	X1	X2	X3	Z
Y	1.000000	0.090724	0.082053	-0.142585	0.346971
X1	0.090724	1.000000	-0.453568	-0.458925	0.170028
X2	0.082053	-0.453568	1.000000	0.403415	0.048595
X3	-0.142585	-0.458925	0.403415	1.000000	0.211274
Z	0.346971	0.170028	0.048595	0.211274	1.000000

6. Uji Heteroskedastisitas

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test
 Equation: UNTITLED
 Specification: Y C X1 X2 X3
 Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

Panel Period Heteroskedasticity LR Test
 Equation: UNTITLED
 Specification: Y C X1 X2 X3
 Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

7. Uji Parsial

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/17/25 Time: 00:41
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 31
 Total panel (balanced) observations: 155

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.554493	0.102328	5.418760	0.0000
X1	1.592321	0.273507	5.821872	0.0000
X2	1.320827	0.384878	3.431811	0.0008
X3	0.126852	0.211211	0.600594	0.5493
Z	-0.702410	0.215371	-3.261392	0.0015
X1Z	1.197356	0.524847	2.281344	0.0243
X2Z	-6.498852	3.264785	-1.990591	0.0489
X3Z	5.244414	0.899784	5.828525	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.678779	Mean dependent var	1.006282
Adjusted R-squared	0.577197	S.D. dependent var	0.114234
S.E. of regression	0.074279	Akaike info criterion	-2.152912
Sum squared resid	0.645528	Schwarz criterion	-1.406782
Log likelihood	204.8507	Hannan-Quinn criter.	-1.849851
F-statistic	6.682043	Durbin-Watson stat	2.371791
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 2. Biodata Penulis**BIODATA PENULIS**

Nama : Addini Fitri Fadilah
TTL : Pasuruan, 21 Desember 2002
Alamat Asal : Jalan Bambu Runcing RT. 02 / RW. 01, Desa
Karangsono, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan, Jawa Timur
Telepon/HP : 081252610074
E-mail : addiniftrifadilah@gmail.com
Instagram : @addini_ff

Pendidikan Formal

2009-2015 : SD Negeri Glagahsari 1 Sukorejo
2015-2018 : SMP Negeri 1 Sukorejo
2018-2021 : SMA Negeri 1 Pandaan
2021-2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2021-2022 : MSAA UIN Maulana Malik
Ibrahim
2021-2022 : Program Khusus Pendidikan
Bahasa Arab (PKPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang
2022-2023 : Program Khusus Pendidikan

Bahasa Inggris (PKPBI) UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pengalaman Oranisasi

- Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Lampiran 3. Bukti Konsultasi

4/17/25, 1:26 AM

Print Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 FAKULTAS EKONOMI
 Gujrayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 210502110107
 Nama : Addini Fitri Fadilah
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Dosen Pembimbing : Sri Andriani, M.Si
 Judu Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	6 Agustus 2024	Membahas terkait pengujian outline penelitian, topik yang diteliti, serta metode untuk mencari jurnal-jurnal rujukan Internasional yang relevan.	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
2	9 Agustus 2024	Pembahasan cara efektif untuk mencari jurnal menggunakan software <i>Publib or Period</i> (POP), memastikan topik penelitian didukung oleh sumber rujukan yang kredibel dan terbaru.	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
3	13 Agustus 2024	Mendiskusikan pengutipan kasus melalui berita, memastikan bahwa informasi yang dikutip akurat dan relevan dengan topik penelitian, serta diambil dari sumber yang kredibel dan terpercaya.	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
4	16 Agustus 2024	Pembahasan bab 2, mengenai ketentuan penelitian terdahulu yang mencakup jurnal-jurnal Internasional yang terindeks Scopus maupun Sinta, serta memastikan bahwa jumlah jurnal yang dirujuk memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi penelitian	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
5	23 Agustus 2024	Pembahasan mengenai jurnal rujukan, yang mencakup variabel-variabel yang relevan serta hipotesis penelitian yang telah diajukan.	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
6	2 Oktober 2024	Membahas Latar Belakang Penelitian pada Bab 1. Pada Bab 2, menguraikan ketentuan penelitian terdahulu. Selain itu, membahas penambahan variabelmoderasi, yang akan memberikan wawasan lebih mendalam tentang hubungan antara variabel-variabel utama dalam penelitian.	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi

4/17/25, 1:26 AM

Poin Jurnal Bimbingan Skripsi

7	9 Oktober 2024	Pembahasan mengenai penambahan variabel moderasi, dan Pada Bab 3 mengenai metode pengujian yang digunakan	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
8	21 Oktober 2024	Mendiskusikan mengenai revisi skripsi setelah seminar proposal	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
9	23 Oktober 2024	Membahas data penelitian untuk segera dicicil dan dirapikan di excel untuk mempermudah saat running	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
10	4 November 2024	Pembahasan terkait tabulasi data penelitian	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
11	16 November 2024	Pembahasan cara merunning data untuk studi skripsi	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
12	3 Februari 2025	Mendiskusikan mengenai bab 4 dalam skripsi guna bisa lanjut untuk bab selanjutnya	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
13	12 Februari 2025	Pembahasan skripsi pada bab 5 agar bisa lanjut mengerjakan artikel	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
14	24 Februari 2025	Membahas mengenai keselarahan isi artikel untuk dapat disubmit pada jurnal	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Malang, 24 Februari 2025
Dosen Pembimbing



Sri Andriani, M.Si

Lampiran 4. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
 NIP : 198409302023211006
 Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Addini Fitri Fadilah
 NIM : 210502110107
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originality report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
25%	23%	15%	9%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 April 2025

UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd